



Warga Jakarta Buru Masker

MASYARAKAT mulai memburu masker menyusul abu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK) yang menyebar ke sejumlah daerah, di antaranya adalah Jakarta. Sejumlah warga menyerbu pedagang masker di kawasan kolong tol Andara, Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Minggu (6/9).

Seperti diberitakan, pada Minggu (6/9), lapak pedagang masker dikerumuni warga. Warga pun memborong masker, setidaknya mereka membeli dua kotak dengan isi 50 potong per kotak.

Ada pula warga yang membeli masker bungkus isi 10 potong, mencari masker untuk anak yang lebih kecil, serta memburu masker untuk pengguna hijab.

Warga Lebak Bulus II, Dian dan Supri, sengaja membeli masker lantaran situasi terkini abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di Jakarta. Mereka menambah stok untukantisipasi sebaran abu vulkanik berlangsung lama.

"Kalau beli masker sih saya emang biasa beli, cuma kan kali ini pas ada abu ya, Bu, ya? Beli

Lanjut ke hal A2 kol. 1



RATUSAN calon penumpang antri di kounter check-in tiket lantai II KNIA untuk reschedule jadwal keberangkatan akibat erupsi debu vulkanik GAK.

Imigrasi Tangkap 55 WNA Asal China

JAKARTA (Waspada): Sebanyak 55 Warga Negara Asing (WNA) asal China ditangkap dalam sebuah operasi pengawasan yang berlangsung pada Kamis, 3 September 2026.

Mereka ditangkap di Tangerang Selatan (Tangsel). Penangkapan puluhan WNA itu terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal. Dientur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Maranto-ko, menjelaskan operasi ini bermula dari patroli siber dan mendapati indikasi penyalahgunaan izin tinggal oleh sejumlah WNA di lokasi proyek pembangunan tersebut. Petugas mengantongi identitas sejumlah WNA yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Di antaranya berinisial FZ, HL, JY, SY, dan ZZ; lima orang pria pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dengan penjamin PT BOS. Selain itu, ditemukan pula satu orang berinisial XX pemegang visa kunjungan multipel dengan PT WD sebagai penjamin.

Di lokasi, Imigrasi juga mengidentifikasi SJ, XB, dan ZP; tiga WNA China pemegang visa kunjungan tanpa penjamin.

"Ada dugaan penyalahgunaan izin tinggal di proyek tersebut.

Lanjut ke hal A2 kol. 6

26 Penerbangan KNIA-Jakarta Batal

Dampak Semburan Vulkanik GAK

DELISERDANG (Waspada): Semburan vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda yang terjadi dalam dua hari terakhir berdampak pada penerbangan di Kuala Namu International Airport (KNIA) dengan tujuan Jakarta dan sebaliknya, Minggu (6/9).



RUAS jalan di Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, menuju Kab. Karo, nyaris putus akibat longsor berkepanjangan.

Longsor Jalur Langkat-Karo Berlanjut

STABAT (Waspada): Longsor yang terjadi di jalur alternatif Medan-Berastagi via Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat terus berlanjut.

Hasil pantauan WASPADA, Sabtu (5/9), petugas berwenang telah memasang rambu hati-hati agar pengguna kendaraan bermotor tidak jatuh ke jurang akibat badan jalan nyaris putus.

Untuk sementara waktu,

pihak kepolisian melarang truk dan mobil besar melintas karena berpotensi terperosok ke jurang di kawasan tersebut.

Sementara itu, beberapa mobil kecil seperti Avanza dan lain-lain juga memilih putar haluan daripada berisiko masuk jurang.

Sebelumnya, Harian WASPADA edisi 10 Agustus 2026 telah memberitakan tentang kondisi

badan jalan naungan Pemprov su yang nyaris putus tersebut. Saat ini, kondisi ruas jalan tersebut semakin parah akibat longsor yang terus berlanjut.

Pantauan lainnya, badan jalan yang terkikis itu membentuk rongga pada bagian pondasi dan struktur bawah jalan, hingga mobil rawan terperosok.

Lanjut ke hal A2 kol. 1

2 Negara Disanksi AS Tetap Bertahan

JAKARTA (Waspada): Iran telah berada di bawah sanksi ekonomi Amerika Serikat selama lebih dari 47 tahun. Saat ini setelah perang berlangsung selama enam bulan, sanksi sekunder dan blokade juga dijatuhkan AS atas negara itu.

Negara adidaya itu akan melarang negara-negara di dunia memberi bantuan atau menjalin bisnis dengan Iran. Namun selama hukuman berlangsung Iran belum juga menunjukkan tanda-tanda menyerah bahkan makin lantang melawan.

"Kami menyatakan kepada semua negara... jangan bergabung dalam perang ekonomi yang dikobarkan oleh Amerika Serikat," kata Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, dalam siaran televisi pemerintah Iran.

"Negara mana pun yang berpartisipasi dalam penerapan pembatasan ekonomi terhadap kami akan dianggap sebagai musuh," tambahnya.

Iran bukan satu-satunya negara yang disanksi oleh AS selama puluhan tahun. Ada Kuba dan Korea Utara yang tetap bertahan meski dalam kondisi ditekan.

Kuba sudah disanksi oleh AS

Lanjut ke hal A2 kol. 6

yang dapat membahayakan penerbangan.

Sejumlah maskapai penerbangan dari Bandara Kualanamu tujuan Jakarta dan dari Jakarta ke Bandara Kualanamu di Deliserdang, Sumatera Utara, yang membatalkan penerbangannya

masing-masing Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Batik Air dan Pelita Air.

Akibat pembatalan penerbangan ini, ribuan penumpang dari lima maskapai ini harus rela antri untuk melakukan reschedule jadwal penerbangan pada

keesokan harinya atau Senin, 7 September 2026

Bahkan, penumpukan ribuan calon penumpang ini terjadi di sejumlah kounter check-in. Seperti kounter check-in B, C

Lanjut ke hal A2 kol. 6



POLISI mengamankan seorang calon penumpang pesawat karena kedapatan membawa sabu-sabu di Bandara Kualanamu.

Penumpang Pesawat Bawa 1 Kg Sabu

MEDAN (Waspada): Seorang calon penumpang pesawat berinisial MR ditangkap petugas di Bandara Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara, membawa 1 Kg sabu-sabu.

Tersangka kedapatan menyelundupkan sabu-sabu di antara lipatan pakaian, saat hendak berangkat menuju Jakarta.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy

Arisandi, mengatakan penangkapan berawal dari kecurigaan petugas Avsec terhadap tas bawaan MR saat melewati mesin X-ray.

"Petugas mencurigai ada seorang yang membawa narkoba jenis sabu-sabu. Modusnya, yang bersangkutan menyimpan empat plastik berisi narkoba di lipatan celana jeans," kata Andy di Mapolda Sumut,

Sabtu (5/9).

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut, dan ditemukan empat bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dengan total berat sekira 1 kilogram. "Narkoba tersebut sengaja disamarkan untuk menghindari pemeriksaan petugas di bandara," kata dia.

Lanjut ke hal A2 kol. 6

Ada-ada Saja

Kafe Tempat Orang Murung

SEBUAH kafe di Tokyo, Jepang, menawarkan konsep yang cukup berbeda dari tempat nongkrong pada umumnya.

Negative Cafe and Bar Mori Ouchi dibuat sebagai ruang bagi orang-orang yang merasa

Lanjut ke hal A2 kol. 6

Serampang

- Dulu induk sekarang anak

- He...he...he...



Harian Umum Nasional

WASPADA

Demi Kebenaran dan Keadilan

ISSN: 0215-3017

SENIN, Pahing, 7 September 2026/25 Rabiul Awal 1448 H

No: 2786890 Tahun Ke-79 Terbit 12 Halaman



Al Bayan

Takabur

Oleh: Dr Nada Sukri Pane

"Sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan manusia" (HR. Muslim)

TAKABUR merupakan salah satu sifat tercela yang sangat dibenci Allah. Orang yang takabur memandang diri sendiri lebih tinggi, lebih baik, atau lebih sempurna dibandingkan orang lain. Mereka cenderung meremehkan dan merendahkan orang lain. Ia selalu ingin dipuji oleh orang di sekitarnya. Takabur termasuk akhlak tercela (akhlak mazmumah). Dia lupa bahwa segala kelebihan yang dimilikinya hanyalah titipan Allah SWT semata.

Orang yang takabur cenderung menolak kebenaran yang datang dari orang lain meskipun ia tahu bahwa hal itu benar. Ia juga suka meremehkan dan memandang rendah orang lain karena merasa dirinya lebih tinggi dan lebih baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang takabur suka menolak kebenaran. "Sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan manusia" (HR. Muslim).

Lanjut ke hal A2 kol. 1

Reuni Perak IAY 2001

Ijeck: Pererat Silaturahmi Dan Perbanyak Kegiatan Sosial



KETUA Ikatan Abiturient Yaspindhhar (IAY) H. Musa Rajekshah (Ijeck), menerima kunjungan Panitia Reuni Perak IAY 2001.

MEDAN (Waspada): Setelah 25 tahun meninggalkan bangku sekolah, para alumni Ikatan Abiturient Yaspindhhar (IAY) Angkatan 2001 akan kembali berkumpul dalam Reuni Perak 25 Tahun, Sabtu (12/9) mulai pukul 17:00 s/d selesai di Focal Point, Medan.

Tidak hanya temu kangen, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, mengenang kembali masa-masa sekolah, sekaligus membangun kebersamaan yang lebih kuat di antara para alumni.

Para panitia IAY 2001 telah berkunjung kepada Ketua IAY H. Musa Rajekshah yang akrab dikenal Ijeck. Dia

Lanjut ke hal A2 kol. 3

Agus Dwi Handaya Kembali Pimpin IKAFEBUSU Periode 2026–2030

MEDAN (Waspada):Agus Dwi Handaya kembali dipercaya menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (IKAFEBUSU) periode 2026–2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XIIIKAFEBUSU yang digelar di Aula Sihaji Hadibroto FEB USU, Medan, Sabtu (5/9).

Munas XII dihadiri sekitar 250 alumni FEB USU dari berbagai jenjang pendidikan, mulai D3, S1, S2 hingga S3. Para peserta berasal dari berbagai angkatan, dengan rentang stambuk 1977 hingga 2021.

Dekan FEB USU Dr. Abdilaz Arif Nasution dan Pengurus Pusat IKA USU yang diwakili Prof. Dr. Hasim Purba SH, MHum, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Munas XII mengangkat tema “Mengkakselerasi Transformasi IKAFEBUSU melalui Sinergi Alumni, Inovasi Berkelanjutan dan Jejaring Global.” Tema tersebut menjadi arah bagi kepengurusan IKAFEBUSU periode 2026–2030 untuk memperkuat kolaborasi alumni, mendorong inovasi, serta memperluas jejaring organisasi.



Waspada/1st

AGUS DWI HANDAYA kembali dipercaya menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU periode 2026–2030, dalam Munas XII IKAFEBUSU di Aula Sihaji Hadibroto FEB USU, Medan, Sabtu (5/9).

Usai kembali dipercaya memimpin IKAFEBUSU, Agus menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan alumni merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja dan manfaat nyata.

“Kepercayaan bukanlah untuk dinikmati, kepercayaan adalah tanggung jawab yang harus

dijawab melalui manfaat,” ujar Agus.

Menurut Agus, IKAFEBUSU memiliki kekuatan besar melalui jejaring alumni yang tersebar di berbagai profesi dan sektor. Potensi tersebut, kata dia, perlu dihimpun melalui sinergi lintas generasi dan kolaborasi yang berkelanjutan.

“Potensi alumni yang tersebar di berbagai profesi dan sektor merupakan kekuatan IKA-FEBUSU. Karena itu, sinergi lintas generasi, inovasi dan penguatan jejaring menjadi modal penting untuk membangun organisasi alumni yang semakin berdampak,” katanya.

Munas XII juga menjadi

momentum konsolidasi alumni FEB USU untuk memperkuat kebersamaan dan melanjutkan transformasi organisasi. IKA-FEBUSU diarahkan menjadi organisasi alumni yang solid, profesional, inovatif, kolaboratif, serta memiliki jejaring yang lebih luas di tingkat nasional maupun global. *(m11)*

Warga Jakarta

lagi,” kata Supri.

“Kata dia [pedagang] barangnya nanti sore datang. Yang biasa saya beli kan biasanya murah, yang kayak gini cuma Rp8 ribu, tapi barangnya habis,” ujar Dian.

Selain itu, ada Reino warga Andara yang mengatakan kondisi udara buruk imbas abu vulkanik ini mendorongnya membeli masker. Reino mengaku sempat kaget karena sejak pagi kondisi rumahnya dipenuhi abu vulkanik.

“Sebetulnya memang sekali-sekali memang saya mempersiapkan masker selalu di rumah. Karena memang kondisi udara kita juga kurang baik kan,” sebut Reino.

“Panasnya luar biasa dan segala macam, terus ya banyak virus dan penyakit tentunya, sehingga efektif sekali kalau kita tetap menyediakan masker,” tuturnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, mengimbau warga untuk waspada terhadap dampak abu vulkanik.

Meski begitu, Marulitua menjabarkan sejumlah langkah bisa dilakukan warga DKI dalam menghadapi hujan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang kini sudah mulai menyelimuti wilayah Jakarta.

Pertama adalah menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Masker kain biasa kurang optimal untuk menyaring partikel abu vulkanik.

Kedua, menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah. Warga juga disarankan mematikan kipas atau pendingin ruangan yang menarik udara dari luar apabila kondisi udara di sekitar rumah terdampak abu.

Ketiga adalah mengurangi aktivitas di luar rumah, khususnya bagi bayi, anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga dengan asma, penyakit paru, atau penyakit jantung.

Kemudian apabila terdapat abu di sekitar rumah, warga diminta membasahinya terlebih dahulu sebelum membersihkannya. Abu sebaiknya tidak disapu dalam kondisi kering karena dapat membuat partikelnya kembali beterbangan dan terhirup.

Kelima, menutup tempat penyimpanan air dan makanan. Air atau makanan yang terpapar abu vulkanik sebaiknya tidak dikonsumsi.

Keenam, untuk warga yang mengalami sesak napas berat, nyeri dada, batuk terus-menerus, atau iritasi mata yang semakin parah diminta segera mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan.

Ketujuh, hubungi layanan Jakarta Siaga melalui nomor 112 untuk melaporkan keadaan darurat di wilayah DKI Jakarta. *(cnni)*

Longsor Jalur

Di sana juga terdapat pipa air yang bocor sehingga struktur pondasi aspal semakin rapuh. Dinas PU Sumut serta Dinas Binamarga Bina Konstruksi dan Cipta Karya Sumut yang sudah meninjau lokasi, kemarin, segera mengambil langkah-langkah penanganan darurat.

Selain di kawasan tersebut, titik-titik longsor perbukitan juga terlihat di Dusun Pamah Semelir Desa Telagah. Tidak jauh dari lokasi tersebut, beberapa kali material longsor menutupi badan jalan di sana.

Warga berharap pihak berwenang segera melakukan perbaikan badan jalan itu agar tidak melumpuhkan transportasi masyarakat di daerah wisata dimaksud. *(a11/C)*

Al Bayan

Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa takabur terbagi menjadi dua jenis, yaitu takabur secara batin (dalam hati) dan takabur secara lahir (dalam perbuatan). Takabur batin berupa perasaan tinggi hati dan memandang rendah orang lain. Takabur lahir terlihat dari sikap dan perilaku arogan. “Maka neraka Jahannam itulah sumber-buruk tempat bagi orang-orang yang takabur.” (QS. Az-Zumar: 72).

Suatu hari Nabi Musa as khutbah kepada Bani Israil. Dalam Khutbahnya ia menyampaikan ajaran dan risalah kepada umatnya, dari ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Nabi Musa as juga mengajak mereka untuk menambah ketaatan kepada-Nya. Setelah khutbah selesai, ada salah satu orang bertanya, “Wahai Nabi, Apakah ada di muka bumi ini orang yang lebih alim darimu?” “Tidak ada,” tegas Nabi Musa.

Nabi Musa as khilaf dan takabur. Atas kesombongan Nabi Musa as ini turunlah ayat khusus buat Nabi Musas. Bahwa Allah mengatakan bahwa ada makhluk lain yang lebih pintar darimu Musa. Lalu Allah pertemukan Nabi Musa as dengan Nabi Khaidir as. “Lalu, mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba Kami yang telah Kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi Kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi Kami.” (QS. Al-Kahfi: 65).

Pada perang Badar, Abu Jahal diserang hingga tersungkur ke tanah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW memanggil Ibnu Mas’ud. Saat Ibnu Mas’ud mengangkat pedangnya, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya dan berkata: “Sampaikan salamku kepada temanmu, bilang saya musuhnya dia Dunia Akhirat.” Begitulah kalimat yang keluar dari mulut Abu Jahal yang sombong, walaupun kondisinya sudah di ujung kematian.

Mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas’ud mengangkat pedangnya dan menebas batang leher Abu Jahal yang sombong. Nabi SAW bertanya, “Apaya yang diucapkanya?” Ibnu Mas’ud menjawab: “Dia katakan dia musuh Nabi Muhammad SAW Dunia dan Akhirat.” Na’udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, “Sesungguhnya Fir’aun lebih sombong. Fir’aun tidak mau menyebut nama Nabi Muhammad”.

Lawan dari sifat takabur adalah rendah hati. Manusia Muslim diajarkan agamanya agar bersikap rendah hati atau tawadhu’ dengan tidak menghinakan dirinya. Rendah hati merupakan akhlak yang ideal dan sifat yang terpuji. Rendah hati juga mampu melembutkan hati, jauh dari sifat sombong, tinggi hati dan takabur. “Rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang Mukmin” (QS. Asy-Syuara: 215).

Hendaklah selalu dilatih rendah hati agar mampu memadamkan takabur. Karena orang yang memiliki sikap rendah hati akan memperoleh kedudukan yang terhormat dalam segala kehidupannya. Nabi SAW bersabda; “Harta tidak akan berkurang karena sedekahkan, Allah akan menambahkan kemuliaan bagi orang yang pemaaf. Tidak ada seorangpun yang bersikap rendah hati karena Allah, kecuali akan diangkat derajatnya” (HR. Muslim).

(Guru SMAN 16 Medan, Alumni Doktor PEDI UIN SU)

Mensos Jamin Perubahan Desil Tak Otomatis Coret Bansos

JAKARTA (WASPADA): Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan perubahan peringkat kesejahteraan atau desil di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak serta-merta membuat penerima bantuan sosial (bansos) langsung dicoret.

Data sosial bersifat dinamis dan terus dimutakhirkan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang tepat. Gus Ipul menjelaskan, DTSEN merupakan hasil konsolidasi berbagai sumber data yang kemudian distandarisasi dan diperingkatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS menjadi pengelola data tunggal, sementara Kementerian/Lemba dan pemerintah daerah berperan dalam proses pemutakhiran.

“Ini adalah pemeringkatan relatif karena setiap hari data ini dinamis sekali. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Sabtu (5/9).

Menurutnya, proses pemutakhiran menggunakan berbagai sumber data pemerintah, sehingga perubahan peringkat dapat terjadi ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun

data pendukung mengalami perubahan.

“Kalau sekarang itu ada lonjakan-lonjakan, ini sedang diperbaiki, sedang dimutakhirkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama desil-desilnya atau pemeringkatannya sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan, masyarakat memiliki sejumlah saluran untuk ikut memperbaiki data. Pemutakhiran dilakukan melalui SIKS-NG oleh operator desa/kelurahan dan dinas sosial, serta melalui Cek Bansos, ground check, call center, WhatsApp Lapor Bansos, Cek DTSEN, dan platform Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Dalam skema tersebut, informasi atau usulan masyarakat dapat menjadi bahan pemutakhiran di Kementerian Sosial. Data selanjutnya diproses dan BPS melakukan pembaruan pemeringkatan dalam DTSEN.

Ground check juga dilakukan oleh petugas lapangan, antara lain pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), petugas BPS, maupun pemerintah daerah, untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan data.

“Jika sekarang ditemukan desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya dicoret karena masih ada masa sanggah, masa pemutakhiran untuk kemudian akan disalurkan pada tiga bulan berikutnya,” jelas

Gus Ipul.

Ia menegaskan, penetapan penerima bansos dilakukan secara berkala, yakni setiap tiga bulan, berdasarkan hasil pemutakhiran yang kemudian diukur kembali oleh BPS.

“Tidak serta-merta jika sekarang ditemukan desil 10 kemudian bansosnya dicoret, bansosnya tidak disalurkan. Itu menurut saya informasi yang salah,” tegasnya.

Gus Ipul menjelaskan, proses pemutakhiran DTSEN tidak dilakukan berdasarkan satu sumber data saja. BPS melakukan standarisasi variabel dan validasi sehingga data dari berbagai Kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dapat dikonsolidasikan. Instrumen standar-disasi BPS mencakup lebih dari 40 variabel, dengan proses validasi yang melibatkan petugas survei yang telah dilatih BPS.

Keberanan data juga harus dapat dibuktikan serta terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi. “Pemerintah terbuka sesuai arahan dari Bapak Presiden. Kita ingin data ini memang makin akurat dan untuk keperluan itu membuka partisipasi masyarakat,” kata Gus Ipul.

Karena itu, masyarakat didorong aktif menyampaikan koreksi. Jika menemukan penerima bansos yang dinilai tidak layak tetapi mendapatkan bantuan, masyarakat dapat menyampaikan sanggahan. *(Sindu)*

26 Penerbangan

dan D terlihat para calon penumpang antri dengan tertib untuk melakukan penjadwalan ulang akibat faktor bencana letusan Gunung Anak Krakatau di selat Sunda ini

Namun dari pantauan di sejumlah kounter check-in tujuan Jakarta, ratusan calon penumpang juga ada yang melakukan refund terhadap travel pembelian tiket secara online dan membeli tiket untuk esok harinya.

Ika, calon penumpang dengan tujuan Solo transit Bandara Soekarno Hatta, mengatakan penerbangannya terpaksa dibatalkan karena bencana debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Seharusnya, Ika berangkat pukul 10:00 tadi, namun saat tiba di Bandara Kualanamu penerbangannya dibatalkan.

“Saat saya tiba pukul 07:00 pagi tadi, dapat kabar penerbangan saya dengan Citilink pukul 10:00 pagi tujuan Solo transit Jakarta terpaksa dibatalkan karena faktor alam adanya debu vulkanik. Dan harus dilakukan penjadwalan ulang,” ujar Ika.

Berdasarkan informasi dari PT. Angkasa Pura Aviase selaku pengelola bandara, jika intensitas semburan debu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin tinggi yang statusnya saat ini level tiga (Siaga), dipastikan jumlah pembatalan penerbangan tujuan Jakarta akan terus bertambah.

Sementara penerbangan tujuan Batam, Pekanbaru yang merupakan tujuan domestik masih aman dan operasionalnya berjalan seperti biasa. Sama seperti rute internasional yang tidak terdampak debu vulkanik Gunung Anak Krakatau, penerbangannya tetap berjalan normal. *(a26/C)*

Penumpang Pesawat

Kepada petugas, MR mengaku mendapat sabu-sabu tersebut dari Aceh untuk dikirim ke Jakarta melalui Bandara Kualanamu.

Tersangka mengatakan sudah dua kali menyelundupkan sabu-sabu melalui Bandara Kualanamu atas perintah seseorang berinisial RS alias JS.

Sebagai imbalan, MR dijanjikan uang sebesar Rp40 juta.

Polisi kini masih memburu RS alias JS yang diduga memerintahkan MR membawa sabu-sabu dari wilayah Sumatera Utara menuju Jakarta.

Kasus tersebut masih dalam proses pengembangan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. *(m17)*

2 Negara

sejak 1962 di era Presiden John F Kennedy.

Kennedy mengumumkan embargo perdagangan antara AS dan Kuba, sebagai tanggapan atas tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah Kuba, dan mengarahkan Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan untuk menerapkan embargo tersebut, yang masih berlaku hingga saat ini.

Dampak dari sanksi ekonomi ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Laporan The Guardian pada 2022 saat menengan 60 tahun sanksi ke Kuba menuliskan, dampak isolasi akibat embargo AS tidak mungkin diabaikan.

Dermaga setengah kosong: AS telah melarang semua kapal pesiar, pertukaran budaya, dan delegasi pendidikan yang dulunya mendorong industri terbesar di pulau itu.

Rumah sakit kekurangan persediaan, AS telah melarang ekspor teknologi medis dengan komponen AS, yang menyebabkan kekurangan kronis obat-obatan bebas resep.

Bahkan internet pun menjadi zona isolasi. Embargo AS berati warga Kuba tidak dapat menggunakan Zoom, Skype, atau Microsoft Teams untuk berkomunikasi dengan dunia luar.

Dan yang cukup miris adalah jeritan warga yang hanya mendapatkan jatah listrik. Namun Kuba masih tetap berdiri sampai sekarang.

Sementara Korea Utara jauh lebih lama lagi diberi hukuman, yakni sejak tahun 1950. Embargo perdagangan dan keuangan awal diterapkan menyusul keterlibatan militer di Perang Korea.

Sanksi itu biasanya diperbaharui secara berkala. Tahun 2006, Korut mendapatkan sanksi baru dan pengetatan aset keuangan, pasca uji coba nuklir pertama Korut. Lalu 10 tahun kemudian perluasan sanksi ketat terhadap akses sistem keuangan global dan pelarangan transaksi perbankan.

Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi tambahan terhadap sejumlah individu dan lembaga dari Korea Utara serta negara ketiga yang diduga menempatkan teknis teknologi informasi (TI) secara ilegal di perusahaan-perusahaan AS untuk mengumpulkan dana bagi pengembangan senjata pemusnah massal (WMD).

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS pernah mengumumkan bahwa pekerja teknologi informasi yang terkait dengan Korea Utara melakukan penipuan terorganisir dengan menggunakan dokumen palsu dan identitas curian untuk bekerja di perusahaan-perusahaan sah di AS maupun negara sekutunya.

OFAC menyatakan telah memasukkan enam individu dan dua lembaga yang terlibat dalam kegiatan tersebut ke dalam daftar sanksi. Sama seperti Kuba, Korut pun masih tetap bertahan sampai saat ini. *(cnni)*

Imigrasi Tangkap

Karena itu kami lakukan penyelidikan, kami dapati sejumlah nama, barulah tim kami bergerak untuk melakukan operasi [pengawasan],” kata Hendarsam, Sabtu (5/9).

Sementara itu, 27 WNA pemegang ITK yang juga diduga melakukan aktivitas bekerja tidak dilakukan detensi, namun paspor mereka telah dikenalkan tindakan administratif berupa penahanan paspor (STP) untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya, terdapat empat WNA China pemegang ITK yang diduga bekerja dan paspornya telah diamankan dari pihak perusahaan, namun keberadaan orang yang bersangkutan belum ditemukan.

Keempatnya telah dimasukkan ke dalam daftar Subject of Interest (SOI) untuk mendukung proses pengawasan dan penelusuran lebih lanjut. Adapun, tujuh WNA China lainnya yang juga diduga melakukan aktivitas bekerja telah dikenalkan tindakan administratif berupa penahanan paspor saat ditemukan di lokasi.

Ketujuh orang tersebut tidak dilakukan detensi dan dijadwalkan hadir untuk memberikan keterangan kepada petugas Imigrasi pada Rabu, 9 September 2026.

“Operasi pengawasan kami lakukan secara berkala untuk menjaga ketertiban, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Imigrasi,” sebutnya. *(Sindu)*

Ada-ada Saja

pesimisitis, sedang menghadapi masa sulit, atau ingin sejenis melepaskan berbagai pikiran negatif.

Kafe yang berada di kawasan Shimokitazawa, Tokyo, ini sempat mendapat perhatian karena konsepnya yang secara terbuka mengakomodasi orang-orang dengan suasana hati murung dan pandangan pesimisitis.

Mengutip Forbes, Sabtu (5/9) ide mendirikan kafe tersebut muncul dari pemiliknya yang juga pernah mengalami depresi. Gagasan itu sebenarnya sudah muncul lebih dari satu dekade sebelumnya, tetapi baru direalisasikan pada 2020, ketika pandemi Covid-19 melanda.

Alih-alih memaksa pengunjung untuk selalu berpikir positif, kafe ini justru menawarkan tempat yang memungkinkan mereka menjadi diri sendiri.

Pemilik Mori Ouchi berpandangan bahwa menjadi orang yang berpikiran negatif tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. Dia menilai, sebagian orang yang cenderung pesimisitis justru memiliki karakter pendiam dan berhati-hati dalam bersikap.

Karena itu, menurutnya, diperlukan sebuah tempat yang nyaman agar mereka bisa bersantai tanpa merasa harus berpura-pura selalu bahagia. Konsep tersebut menjadi daya tarik utama Mori Ouchi.

Kafe ini pada dasarnya ingin menciptakan suasana yang berbeda dari lingkungan sosial yang sering kali mendorong seseorang untuk selalu terlihat positif.

Forbes sebelumnya melaporkan bahwa Mori Ouchi dirancang sebagai tempat bagi orang-orang untuk melepaskan kekesalan dan menikmati waktu tanpa tekanan untuk menunjukkan suasana hati tertentu. (kompas.com)



1 unit rumah di Kompleks Pondok Surya, Blok 2 No.47, Kec, Medan Helvetia, Kel.Helvetia Timur, Kota Medan. Surat : SHM
 Luas Tanah : 270m2 (sekitar 12x23).
 Luas Bangunan : 99m2 (sekitar 10x10) teras/taman depan luas.
 Posisi tepat di depan lapangan bola.
 Harga 895jt, nego setelah cek lokasi.
 Hub. **Amin 082162336652**

Ingin Rumah Anda
 Cepat Terjual?
 Pasang iklan di

**Harian
 WASPADA**

PASANG IKLAN
 DENGAN CARA MUDAH

- HUBUNGI -

0811 604 690

Menteri LH Canangkan Wakaf Hijau Dan Tobat Ekologis Nasional Di UISU

MENTERI Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia Moh. Jumhur Hidayat melakukan pencaangan wakaf hijau dan tobat ekologis nasional di Fakultas Pertanian UISU Jl. Karya Wisata Medan Johor, Sabtu (5/9) pagi. Pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi Pengurus Yayasan Wakaf UISU itu dirangkai dengan seminar nasional dengan tema Ekosistem Syariah: “Inisiasi wakaf hijau dan pengembangan ekosistem halal Sumatera Utara Menuju Indonesia Emas 2045 di Grand Inna Hotel Medan”.

Secara simbolik, Menteri LH melaksanakan penanaman pohon sekaligus meresmikan Laboratorium Agroforestri di FP UISU sebagai pilot project wakaf hijau UISU dan gerakan tobat ekologis nasional. Turut mendampingi Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf UISU Ir. Indra Gunawan, MP, Rektor UISU Prof. Dr. Safrida, SE, M.Si, Ketua Umum Aptisi M. Budi Djatmiko dan undangan lainnya. Kepada wartawan, Menteri LH mengatakan tobat nasional ekologis adalah bentuk pengakuan bahwa kita pernah salah dalam mengelola

lingkungan.

Untuk itu langkah selanjutnya adalah kampanye untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. “Salah satunya pengelolaan sampah,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya akan membuat regulasi untuk mengatur dan mengelola sampah yang terus bertambah setiap hari. Untuk koordinasi, lanjutnya, pemerintah tidak melarang untuk mengambil manfaat dan keuntungan. “Tapi jangan sampai mencelakakan orang lain,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua panitia kegiatan Dr. Dani Sintara, SH, MH menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan seminar nasional menghadirkan pembicara diantaranya Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, Direktur Utama PT. Perhutani, Tio Handoko, Koordinator LLDIKIT Wilayah I Sumut , Saiful Anwar Matondang, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syaria’ah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat,

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), M. Budi Djadmiko, Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), Mansyur Ramly, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Heri W Marpaung.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Umum Yayasan Wakaf UISU, M. Idris, SH, MH berharap kolaborasi dan sinergi ini tidak hanya untuk pelestarian lingkungan tapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi khususnya PTS dalam mengimplementasikan Kampus Berdampak melalui tri dharma PT. “Yayasan Wakaf UISU yang juga bagian dari APPERTI dan APTISI, mengajak BPP PTS dan PTIS di Sumatera Utara untuk terlibat langsung dalam pelestarian lingkungan menuju Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar M Idris.

Di Grand Inna Hotel Medan Ketua Umum Aptisi M. Budi Djatmiko membacakan deklarasi tobat nasional ekologis dan pelan-



Waspada/Ist

MENTERI LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Moh. Jumhur Hidayat menandatangani prasasti peresmian laboratorium Agroforestri sebagai pilot project wakaf hijau UISU di Fakultas Pertanian UISU, Sabtu (5/9).

tikan Pengurus Pusat Kajian Lingkungan Hidup UISU serta penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kerjasama antara 25 Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKIT Wilayah I Sumatera Utara dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Menteri LH juga berkesem-

patan melihat langsung produk inovasi mahasiswa UISU diantaranya, kompos limbah ternak sapi, pupuk organik catching, bawang goreng singkong, abonansapi, kaldu bubuk kulit udang, eco enzym, briket Limbah Sekam Padi, Deterjen Cair dan Sabun Cuci Piring, pupuk organik padat. *(m12)*

Nilam Aceh Naik Kelas

USK-ILO Siapkan Ekosistem Bisnis Berkelanjutan

UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) dan International Labour Organization (ILO) memperkuat dukungan terhadap pengembangan dan hilirisasi nilam Aceh. Komitmen tersebut dibahas dalam kunjungan Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama ILO yang disambut Rektor USK Prof. Mirza Tabrani di Ruang Mini Rektor USK, Banda Aceh, Kamis (3/9).

Dalam pertemuan tersebut, ILO menyampaikan komitmennya

untuk terus mendukung pengembangan nilam bersama USK melalui berbagai kegiatan. Dukungan itu mencakup pelatihan pengelolaan keuangan, perencanaan bisnis dan kewirausahaan, peningkatan kompetensi kelembagaan UMKM, transformasi digital, hingga fasilitasi diskusi dan koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

Project Manager Promise II Impact ILO Jakarta, Djauhari Sitoru, mengatakan kerja sama ILO dengan USK melalui Atsiri Research Center (ARC) telah berlangsung sekitar empat tahun dan menjadi salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan masyarakat.

“Ke depan, kami berkomitmen

untuk terus mempertahankan dukungan terhadap program pengembangan nilam bersama USK, dengan bentuk kegiatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing lokasi,” ujar Djauhari. Ia menjelaskan, ILO juga membuka ruang untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui forum group discussion, kajian, diskusi kebijakan, serta fasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian atau lembaga terkait.

Djauhari menambahkan, selama ini pelaksanaan berbagai kegiatan bersama USK mengacu pada kesepakatan kerja sama sebagai dasar pelaksanaan program. Ke depan, koordinasi teknis yang lebih rutin diharapkan dapat

memperkuat pelaksanaan program agar berjalan lebih efektif dan memberikan dampak lebih besar. Sementara itu, Rektor USK Prof. Mirza Tabrani menegaskan USK memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan nilam sebagai salah satu bidang yang dapat memberikan nilai tambah bagi universitas dan masyarakat.

“Pengembangan ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan pelatihan, tetapi diarahkan pada pembentukan ekosistem bisnis yang mampu mengintegrasikan sektor hulu hingga hilir,” ujar Prof. Mirza. Dalam pengembangan bisnis tersebut, USK telah menyiapkan perusahaan yang nantinya menjadi wadah untuk mengelola berbagai kerja sama pengembangan nilam secara business to business (B2B).

Perusahaan tersebut dirancang dengan kepemilikan mayoritas berada pada USK. “Kolaborasi ini semua B2B, apakah nanti membuat bisnis baru atau membuat pabrik ke depannya. Ini harus sustainable. Jadi bukan hanya training saja, tetapi terus berlanjut,” jelasnya.

Prof. Mirza menekankan keberlanjutan menjadi prinsip penting dalam pengembangan bisnis nilam. Menurutnya, pendekatan yang hanya berorientasi pada pemberian bantuan dan pelatihan tidak cukup untuk memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

“Kalau kita tidak buat bisnis hulu ke hilir, tidak akan bertahan. Jadi bagaimana kita di sini mengajak petani untuk menanam dan kita nanti menjual hasilnya.” *(b04)*

STB HKBP Laguboti Wisuda 38 Wisudawati

SEKOLAH Tinggi Bibelvrouw (STB) HKBP Laguboti mewisuda 38 wisudawati dalam acara yang berlangsung di Aula STB HKBP Laguboti, Jumat (4/9). Wisuda mengangkat tema tahunan HKBP 2026, “Dipanggil untuk Melayani, Diutus untuk Mewariskan Iman” yang diambil dari Ulangan 6:4-9.

Tema tersebut dijabarkan dalam subtema, “Dengan bekal pendidikan teologi, lulusan STB HKBP diutus menjadi pelayan yang setia dalam mengajarkan, menghidupi, dan meneruskan iman kepada generasi mendatang.”

Ketua STB HKBP, Pdt. Marhum Simangunsong, mengatakan pendidikan teologi di STB HKBP tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan, tetapi juga membentuk iman, karakter, dan semangat misi para mahasiswa agar siap menghadapi berbagai tantangan pelayanan. “STB HKBP dipanggil mempersiapkan generasi muda untuk menggumuli teologi dan misi gereja, dari masalah hingga masa depan,” ujarnya dalam laporan.

Ia menambahkan, pendidikan formal merupakan salah satu

sarana strategis untuk mewariskan iman. Karena itu, para lulusan diharapkan mampu mengajarkan, menghidupi, dan meneruskan iman kepada generasi berikutnya melalui pelayanan yang nyata.

Sejalan dengan tema wisuda, penelitian tugas akhir para lulusan juga mengangkat berbagai persoalan kehidupan, antara lain isu lingkungan hidup, gender, penyandang disabilitas, serta persoalan sosial lainnya. Kajian tersebut diarahkan untuk menghasilkan pendekatan pelayanan yang kontekstual, inklusif, dan transfor-

matif.

Dalam bimbingan pastoral, Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST, mengapresiasi para wisudawati dan mengingatkan pentingnya pengajaran iman dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terkecil gereja. Ia juga mengajak para lulusan untuk mencintai dan menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab iman terhadap karya Allah.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Kristen Ditjen Bimas Kristen, Dr. Suwarsono, S.PAK., MM, menilai STB HKBP memiliki keunikan dalam menghasilkan perempuan-perempuan penginjil sekaligus mempertahankan kekhasan pendidikan Bibelvrouw di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, identitas dan tradisi yang dimiliki STB HKBP menjadi kekuatan untuk terus berkontribusi dalam pengajaran iman dan pelayanan gerejawi.

Ketua STB HKBP juga menegaskan komitmen institusi untuk terus meningkatkan tata kelola dan kualitas pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan Rencana Induk

Pengembangan STB HKBP untuk menjadi salah satu perguruan tinggi yang dikenal secara internasional. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STB HKBP, lanjutnya, tidak terlepas dari dukungan pimpinan HKBP YPTT, dosen, tenaga kependidikan, sivitas akademika, jemaat, pemerintah, dan masyarakat.

Acara wisuda turut dihadiri Kepala Departemen Diakonia HKBP Pdt. Eldarton Simbolon, D.Min., Praeses Distrik IV Toba Pdt. Ebsan Hutabarat, M.Th., Praeses Distrik XI Toba Hasundutan Pdt. Marganda Lubis, M.I. Kom., pengurus YPTT HKBP, pelayan full timer HKBP, alumni STB HKBP, perwakilan Pemerintah Kabupaten Toba, pimpinan perguruan tinggi di Tapanuli, pimpinan BRI dan BTN Cabang Balige, Muspika Laguboti, serta tokoh masyarakat. Prosesi wisuda berlangsung khidmat dan penuh sukacita. Para wisudawati diharapkan mampu menjalankan panggilan pelayanan dengan setia serta menjadi bagian dari upaya meneruskan iman kepada generasi mendatang. *(m12)*



Waspada/Ist

PIMPINAN STB HKBP Laguboti dan petinggi HKBP foto bersama wisudawati.

Menakar SEMA Nomor 4 Tahun 2026: Antara Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Sesungguhnya

Oleh: Jupri Wandy Banjarmasinor
Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum USU

Perbedaan pendapat tentang terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai pro dan kontra perihal larangan untuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan bebas menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Larangan upaya hukum untuk putusan bebas yang dituangkan dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 tentang pedoman upaya hukum terhadap putusan bebas, lepas, dan banding, serta upaya hukum banding dan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal menjadi perhatian publik dan memunculkan perdebatan mengenai batas antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Dalam SEMA disebutkan bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan, MA memberikan petunjuk bahwa upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas secara tegas tidak dapat diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 Ayat (2) Huruf a KUHP. Pasal dimaksud berbunyi “Pengajuan pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas”. Kemudian disebutkan pula, terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum banding sebagaimana Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, MA menegaskan bahwa Pasal 168 atau Pasal 285 Ayat

(1) KUHP yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tinggi tidak dapat dimaknai sebagai pengaturan kewenangan upaya hukum banding terhadap putusan bebas. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan bahwa putusan bebas (vrijspraak) tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi oleh penuntut umum mendapat reaksi dari berbagai elemen masyarakat, ada yang mendukung dengan alasan bahwa kebijakan ini dianggap mengakhiri perdebatan dan ketidakpastian hukum terkait upaya hukum terhadap putusan bebas sejak berlakunya KUHP baru.

Pendapat lainnya yang mendukung adalah demi untuk menjamin perduli hak dan kemerdekaan terdakwa secara cepat tanpa harus terkutung-kutung oleh proses hukum lanjutan yang panjang. Surat Edaran ini juga dianggap memberi penguatan pengadilan tingkat pertama mendorong hakim di pengadilan tingkat pertama (judex facti) agar bersikap lebih bertanggung jawab dan rasional dalam menjatuhkan putusan bebas.

Selain mendukung, ada juga yang menolak dan mengkritisi terbitnya surat edaran MA ini. Alasan penolakan sebagai masyarakat adalah putusan bebas dan tidak boleh banding telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, dimana kebijakan ini dinilai mengesampingkan Putusan Mah-

kamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 serta yurisprudensi yang selama ini dipegang oleh para hakim agung.

Dengan terbitnya surat edaran ini berpotensi mencederai rasa keadilan. Dimana sebagian kalangan menilai penuntut umum kehilangan ruang koreksi jika terdapat putusan bebas yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan korban atau masyarakat. Penuntut Umum telah disepakati menjadi perwakilan negara untuk menjamin perlindungan wama negaranya, artinya negara kehilangan ruang koreksi terhadap putusan yang dianggap tidak adil. Bila dianggap bahwa larangan mengajukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan bebas adalah demi kepastian, maka rasa keadilan dimana? Sistem Peradilan Indonesia telah dirancang dengan sistem peradilan bertingkat, yaitu tingkat pertama, tingkat Banding dan Kasasi.

Hal ini secara filosofis dimaksudkan untuk memberi ruang kepada Penuntut Umum dalam mengajukan koreksi apabila terdapat putusan yang dinilai memiliki kekeliruan atau kekhilafan hakim, penulis mengajak agar kita mencoba berbenahi sejenak, berpikir sembari merenung. Bagaimana terhadap putusan yang didasarkan pada penerimaan sesuatu dari pihak terdakwa, disebut pihak boleh melaku si sebagai yang mewakili terdakwa, atau mungkin putusan tersebut berdasarkan adanya intervensi dari pihak tertentu, kepentingan dari kelompok atau keterkaitan kepentingan dengan Majelis

hakim baik itu dari keluarga kerabat atau atensi atasan.

Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia, terdapat beberapa putusan pada tingkat pertama yang kemudian menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah putusan bebas dalam perkara Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024. Terhadap putusan tersebut, Kejaksaan mengajukan upaya hukum kasasi, yang kemudian pada Oktober 2024 dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Dalam perkembangan selanjutnya, terungkap adanya persoalan terkait penerimaan sesuatu oleh Majelis hakim yang menangani perkara pada tingkat pertama. Perkara tersebut menjadi salah satu contoh nyata pentingnya ruang koreksi dan pengawasan dalam proses penegakan hukum. Kebhawatiran lain terhadap larangan mengajukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan bebas tidak hanya sebatas kepada karakter dan kepribadian Majelis hakim pada tingkat pertama, bisa saja setelah kenaikan kesejahteraan hakim belakangan ini, para hakim telah mengalami penuh independensi, tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun. Namun menjadi ruangan perbincangan kembali, bagaimana jika putusan Majelis hakim pada tingkat pertama tersebut terdapat kekeliruan dan kekhilafan Majelis hakim.

Perbedaan sudut pandang

tentang suatu permasalahan hukum antara Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis hakim tentunya tidak lepas dari jam terbang dan semua aparat penegak hukum tersebut. Sehingga dengan adanya perbedaan sudut pandang tersebut yang dipengaruhioleh jam terbang dan pengalaman tentunya akan menjadi ruang perdebatan, ke mana ruang koreksi dapat diberikan apabila upaya hukum banding maupun kasasi tidak lagi tersedia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Hakim pada tingkat pertama, tidak dapat dipis bahwa hakim yang baru disumpah biasanya ditempatkan pada peradilan tingkat pertama. Bagaimana bila putusan Majelis hakim yang baru disumpah dianggap belum memenuhi rasa keadilan bukan karena independensi atau tetapi karena adanya kekeliruan dan kekhilafan oleh karena itu penulis menilai sudah sangat tepat apabila putusan bebas pada tingkat pertama harus diberi ruang koreksi ke Mahkamah Agung pada tingkat persidangan kasasi tanpa harus melalui upaya hukum Banding.

Pengaturan melalui SEMA dikritik karena mengantungkan peran norma undang-undang atau yurisprudensi yang seharusnya diuji secara formal dalam sistem peradilan. Potensi re-judicial review atau pengujian kembali norma Pasal 299 Ayat (2) KUHP baru mengingat MK sebelumnya memutuskan putusan bebas dapat diajukan kasasi melalui putusan nomor 114/PUU-X/2012. Dalam sidang pembacaan putusan pada 28 Maret 2013, MK menghapus frasa “kecuali

SUARA AKADEMIK

Karhutla Perspektif Administrasi Publik

Oleh; Dr. Jonson Rajagukguk
(Dosen S2 MIA UHN)

Setelah Indonesia merdeka 81 tahun, salah satu masalah laten yang belum selesai pada

hari ini adalah kemerdekaan lingkungan. Artinya, masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah masalah klasik dan sudah sering berulang tanpa bisa kita atasi, sekalipun sudah sering terjadi kebakaran lahan. Lantas, bagaimana agar bangsa ini punya kemerdekaan dalam lingkungan dan ekosistem lingkungan yang sehat dan membudaya dengan baik dalam hal inilah muncul konsep Ilmu Administrasi Publik yang seharusnya bisa jadi pedoman, pijakan dalam berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana yang kita pahami bersama secara umum, administrasi publik adalah proses pengelolaan kebijakan, sumber daya, dan program pemerintah oleh lembaga negara untuk melayani kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Berorientasi pada kepentingan umum, penegakan hukum, akuntabilitas, serta penciptaan keadilan sosial, berbeda dengan administrasi bisnis yang berfokus pada perolehan keuntungan. Jika tata kelola negara berdasarkan metode administrasi publik yang baik, maka tata kelola lingkungan hidup bisa dilakukan dengan baik dan kita punya desain pembangunan yang ramah lingkungan, dan mungkin masalah karhutla bisa teratasi dengan baik, minimal dampaknya bisa lebih kecil. Ini tidak, masalah kebakaran lahan dan hutan adalah sebuah gambaran tata kelola negara yang gagal dan tidak mencerminkan konsep administrasi publik bernegara yang baik.

Jika kita lihat bagaimana dampak kerugian karhutla yang sangat besar dengan melihat sebaran data yang ada seperti yang dilaporkan oleh data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, hingga Minggu, 30 Agustus 2026 pukul 21.02 WIB, kondisi hotspot high confidence tercatat sebanyak 946 hotspot terdeteksi secara nasional, turun 629 titik dibandingkan 29 Agustus 2026, dengan sebaran sebagai berikut Kalimantan Barat: 455 titik; Kalimantan Tengah: 308 titik; Sumatera Selatan: 36 titik; Kalimantan Selatan: 18 titik; Jambi: 1 titik; dan Riau: 0 titik. Data tersebut menunjukkan penurunan hotspot secara nasional, namun konsentrasi titik panas masih cukup tinggi terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (Sumber: www.kehutanan.go.id).

Dampak dari karhutla ini sangatlah besar dan merugikan banyak hal. Di ekonomi kita rusak, di lingkungan hidup juga rusak dan banyak ikutan yang terimbas karena kelalaian dan tata kelola negara yang tidak bagus. Kasus karhutla ini tentu mempunyai biaya sosial yang sangat tinggi dimana modal sosial pemerintah bisa hilang dan masyarakat juga makin tidak percaya lagi kepada pemerintah kedepannya. Francis Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity menjelaskan bahwa kepercayaan adalah modal sosial (social capital) yang menggerakkan masyarakat dan institusi secara efektif. Saat kepercayaan ini rapuh, hubungan negara dan masyarakat ikut retak. Akibatnya, setiap kebijakan memicu kecurigaan, dan setiap keputusan publik mudah dipersepsikan sebagai bagian dari kepentingan tertentu.

Kebakaran hutan ini inilah mengerus kepercayaan masyarakat pada institusi bernegara. Ini harus dipulihkan agar konsep kebijakan publik kedepan mendapat dukungan yang baik. Untuk itu, konsep tata kelola lingkungan yang baik harus berlandaskan pada administrasi publik yang baik dan benar dalam implementasinya. Setiap kebijakan yang disusun, setiap keputusan yang diambil, setiap anggaran yang dialokasikan, dalam hal lingkungan hidup harus punya basis moral yang kuat oleh penyelenggara. Kita harapkan krisis lingkungan seperti karhutla kedepan bisa diatasi dengan konsep pencegahan sejak dini, salah satu indikatornya adalah kebijakan lingkungan harus berangkat dari administrasi publik untuk keberlanjutan kesehatan lingkungan hidup kedepannya.

USK Gelar SAPA 2026

SEBANYAK 616 mahasiswa pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) mengikuti Silaturahmi Akademik Pascasarjana (SAPA) USK 2026 di Gedung AAC Dayan Dawood, Senin (31/8). Kegiatan perdana tersebut mempertemukan mahasiswa dari 83 program studi, meliputi jenjang magister, profesi, doktor, spesialis, dan subspesialis dalam satu forum bersama jajaran pimpinan USK.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si., FRSPH, mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan SAPA USK 2026. Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia SAPA USK 2026, Prof. Dr. Ichwana, ST, MP, beserta seluruh panitia yang telah bekerja menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurut Rina, kehidupan mahasiswa pascasarjana tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian tesis, disertasi, maupun pendidikan profesi. Mahasiswa juga perlu membangun jejaring, kepemimpinan, dan kemampuan berkolaborasi. “Kehidupan mahasiswa pascasarjana tidak hanya tentang menyelesaikan tesis, disertasi, atau pendidikan profesi. Kita juga perlu membangun jejaring, kepemimpinan, dan kemampuan berkolaborasi,” ujar Rina.

Karena itu, USK mendukung SAPA sebagai awal terbentuknya forum silaturahmi mahasiswa pascasarjana yang dapat menjadi ruang kolaborasi lintas bidang. *(b04)*



memiliki integritas dan punya rasa takut akan Tuhan. Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan sehingga putusan yang dijatuhkannya belum tentu cermat, tepat dan adil. Sehingga dalam mengantisipasi hal itu dan untuk memenuhi rasa keadilan maka peradilan dibagi menjadi dua tingkat pertama (peradilan dengan original jurisdiction), yaitu peradilan dalam tingkat awal atau permulaan dan tingkat peradilan tingkat banding (peradilan dengan appellate jurisdiction), yaitu peradilan dalam tingkat pemeriksaan ulang.

Oleh karena itu, pada dasarnya putusan yang telah dijatuhkan pada peradilan tingkat pertama, yang belum tentu cermat, benar serta adil dimungkinkan untuk dimintakan keadilan kepada pengadilan tingkat yang lebih tinggi dalam tingkat banding. Semua lingkungan peradilan negara mengenal dua tingkat peradilan itu, pada dasarnya pembagian ini bersifat universal.

Putusan bebas merupakan mahkota keputusan hakim yang telah melalui proses peradilan yang panjang dan harus dihormati. Namun demikian, pengajuan upaya hukum oleh Jaksas Penuntut Umum terhadap putusan hakim termasuk putusan bebas, pada dasarnya merupakan bentuk kontrol dan upaya untuk memastikan bahwa putusan tersebut telah tepat berdasarkan fakta dan penerapan hukum. Upaya tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperjuangkan rasa keadilan serta melindungi kepentingan korban dan masyarakat.

TAJUK RENCANA

Survei Cari “Aman”

Survei lagi. Kali ini dilakukan Poltracking. Hasilnya menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran di titik 63,2%.

Publik menilai survei Poltracking masuk kategori netral atau mencari “aman” saja. Sebelumnya, dua survei saling “berbalas pantun” karena SMRS, lembaga surveinya Saiful Mujani, merilis angka kepuasan pada Presiden Prabowo “anjlok” ke angka 50,1 persen. Sudah parah sekali. Sedangkan Panel Survei Indonesia (PSI) kemudian meng“counter” menempatkan tingkat kepuasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih tinggi, di angka 80,4 persen.

Padahal, angka survei sebelum SMRS dan PSI rata-rata positif karena menunjukkan angka “super bagus” dalam periode 21 bulan masa pemerintahan

Intisari:
“Biasanya terkait survei politik penuh ‘trik’ dan ‘intrik’ sehingga hasilnya bisa membingungkan publik”

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Angka lebih atau di atas 80 persen menunjukkan masyarakat mengaku puas.

Mengapa bisa berbeda. Padahal, semua lembaga survei fokus pertanyaannya hampir sama, terkait aspek politik, hukum, ekonomi, sosial dll, termasuk program MBG, BPJS Kesehatan, efisiensi anggaran, sekolah rakyat, bansos/BLT, stabilitas dan

ketersediaan sembako dll yang tengah dijalankan oleh pemerintahan Prabowo - Gibran.

Hemat kita, seperti halnya hasil survei SMRS cenderung “mendiskreditkan” kinerja Presiden Prabowo semakin menurun, maka rilis hasil survei PSI ini pun jangan diambil hati karena pasti ada yang suka dan tidak suka. Angkanya jauh dari angka SMRS. Begitu pula surveinya Poltracking yang kelihatannya bermain “aman” alias tidak tinggi kali dan tidak rendah betul.

Yang pasti, surveinya SMRS muncul pasca Saiful Mujani diadakan ke polisi karena pernyataannya dalam forum seminar terkait pemerintahan Presiden Prabowo yang “gagal” sehingga Mujani terkesan mengajak elemen masyarakat untuk turun ke jalan melakukan demo-demo, seperti pada rezim Soeharto tumbang. Masalahnya, pengumuman jalur resmi dan konstitusi atau “impeachment” sangat sulit karena semua parpol diajak berkoalisi mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran di DPR (Senayan). Jadi, satu-satunya jalan rakyat harus turun ke jalan seperti saat menumbangkan Soeharto yang berkuasa 32 tahun dengan isu KKN.

Dalam konteks survei, mana yang benar? Jawabnya sama-sama benar karena yang namanya survei bisa dipesan dan lembaga nya bisa dibayar. Poin kritik ini disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan tidak ada lembaga survei yang membantah secara telak atau terbuka karena masing-masing lembaga survei punya cara sendiri.

Jadi, biar saja publik (masyarakat) menilainya.

Kalaupun survei PSI menunjukkan 80,4 persen masyarakat menyatakan puas, sementara 16,7 persen menyatakan tidak puas dan ada 2,9 persen tidak memberikan jawaban. Sedangkan angka-angka survei SMRS cenderung menohok kinerja elite pemerintah nyaris gagal mengemban amanat UUD45 dan Pancasila, nyaris lupa mensejahterakan 285 juta penduduk Indonesia.

Begitu pula dengan lembaga Poltracking Indonesia. Survei terbaru ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat berada di angka 63,2 persen. Dan peneliti utama Poltracking Masduki Amrawi menyimpulkan hasil survei itu menunjukkan mayoritas masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap pemerintahan.

Oleh karena itu boleh percaya dan boleh tidak dengan lembaga survei karena masing-masing menggunakan metodologi, tingkat kepercayaan dan besaran/sebaran responden khas (strategi) lembaga surveinya. Pada poin inilah akar masalahnya, termasuk tidak menyebut sumber dananya (tidak transparan).

Kalau menggunakan data dan kajian survei ilmiah yang benar maka angka-angka lembaga survei tidak akan jauh berbeda. Paling perbedaan “margin error” nya hanya 1-2 hingga 3 persen saja. Jarang sampai di atas 5 persen, apalagi hasilnya sampai terbalik. Calon yang dianggap gagal (rendah di survei) malah memenangkan Pilkada.

Biasanya dengan memperhatikan “margin error” masyarakat (publik) dapat menghindari kesimpulan yang terlalu pasti dan lebih memahami kompleksitas di balik data survei –apalagi terkait survei politik penuh trik dan intrik. Dan setiap lembaga memiliki batasan anggota, anggaran, waktu, dan SDM yang berbeda-beda, sehingga mereka menetapkan target jumlah sampel dan toleransi kesalahan yang tidak sama.±



Mengevaluasi Peran Negara Dalam Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan

Bencana karhutla yang melanda Kalimantan masih menjadi topik hangat negeri ini satu bulan terakhir. Ribuan korban jiwa menderita penyakit pernafasan. Kelompok yang paling rentan adalah anak anak, balita, dan perempuan/tibu hamil yang menderita sesak akibat menghirup udara yang kian memburuk.

Data dari Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat 6.329 kasus infeksi saluran pernapasan akut pada 19–25 Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 20,1 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Paparan partikel PM2,5 serta gas beracun dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, serta gangguan tumbuh kembang janin.

Selain mengganggu kesehatan warga, asap kabut karhutla juga menghambat aktivitas dan ekonomi. Di antaranya adalah kelangkaan air bersih yang memperparah keadaan. Sulitnya warga mencari makanan karena sumber pendapatan harian mereka telah hilang dibakar, hilangnya flora dan fauna yang tinggal di hutan yg menjadikan rusaknya ekosistem hutan. Dan meningkatnya potensi bencana banjir di musim hujan.

Dengan segala kerusakan yang ditimbulkan, seharusnya ini menjadi alarm bagi negara untuk lebih serius dalam penanganan bencana yang berulang tiap tahunnya. Jika kebakaran terus berulang, maka fokus permasalahan seharusnya pada sistem pencegahan dan mitigasi. Namun, kenapa ini terus berulang sepanjang tahun?

Di negara dengan kapitalisme hari ini, keuntungan materi adalah nyawanya. Negara terpantau mengizinkan pembentukan lahan secara massif demi keuntungan korporasi, tanpa memedulikan keselamatan manusia dan ekosistem. Buktiinya mayoritas titik api sekitar 74-85 % berada di area konsesi korporasi bukan lahan liar. Lalu, saat kebakaran terjadi, pemerintah hanya memosisikan diri sebagai pemadam kebakaran dan pemberi imbauan medis.

Maka, jika kita melihat kepada islam terkait dengan permasalahan karhutla yang terus berulang, maka islam secara tegas mengharamkan segala bentuk tindakan yang membahayakan dan merusak alam. Karena hutan termasuk kepemilikan umum (al milkiyah al dimmah) yang haram diprivatisasi demi keuntungan sendiri. Dan negara islam (khilafah) juga bertindak sebagai pelindung (junnah) dan pengurus (rain). Maka negara wajib memberikan jaminan kesehatan, fasilitas medis berkualitas secara gratis, serta pasokan air bersih.

Dalam Islam, negara wajib bertindak tegas dan memberikan sanksi tegas (ta’zir) kepada pelaku perusak lingkungan/ pembakar hutan. Dan di saat yang sama negara harus menghentikam seluruh izin eksplorasi lahan yang merusak ekosistem demi menjamin kualitas hidup generasi mendatang.

Rina Annisa Fitri.

UU Perampasan Aset & Distraksi Teknokratik

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Pesimisme publik terhadap efektivitas UU Perampasan Aset berakar pada realitas paling mendasar: Penghormatan terhadap supremasi hukum berada pada titik nadir

Tuntutan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset belakangan ini menggema dengan nada yang begitu garang di panggung politik nasional. Di ruang publik, regulasi ini dikampanyekan sebagai peluru perak (silver bullet) yang akan memiskinkan koruptor secara instan dan memulihkan kerugian negara melalui mekanisme perampasan tanpa pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture).

Secara normatif, gagasan menyasar langsung urat nadi ekonomi para pelaku kejahatan memang terasa meyakinkan. Namun, membaca teks hukum tanpa membedah konteks relasi kuasa di belak-kangnya adalah sebuah kecerobohan akademis. Kegarangan narasi ini berisiko besar berakhir sebagai macan kertas berikutnya jika struktur sosial-politik yang menopang impunitas tetap dibiarkan utuh. Analisis terhadap RUU Perampasan Aset tidak cukup jika hanya ber-kutat pada dogmatika hukum (legal dogmatics) yang melihat undang-undang sebagai sistem norma yang tertutup dan otonom. Pendekatan formalis semacam ini sering kali gagal menangkap realitas bahwa hukum adalah produk politik yang tidak pernah netral. Untuk itu, artikel ini menggunakan tiga pisau analisis teoretis.

Pertama, ‘Critical Legal Studies (CLS). Aliran ini membongkar mitos bahwa hukum adalah instrumen netral untuk keadilan. CLS menegaskan bahwa hukum sering kali berfungsi untuk melanggengkan hierarki kekuasaan yang ada. Dalam konteks RUU ini, CLS membantu kita melihat bagaimana bahasa hukum yang teknokratik dapat menyembunyikan agenda politik elite untuk melindungi aset mereka sendiri sambil memberikan ilusi reformasi.

Kedua, Law and Society Movement. Perspektif ini menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi di luar teks undang-undang. Sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah penegakan hukum Indonesia, kemajuan progresif di atas kertas sering kali tumpul dalam praktik karena resistensi birokrasi dan budaya hukum yang korup.

Ketiga, Political Economy of Corruption. Kerangka ini melihat korupsi bukan sebagai penyimpangan individu, melainkan sebagai fitur struktural dari sistem kapitalisme oligarkis. Korupsi berfungsi sebagai mekanisme redistribusi surplus ekonomi dari publik ke elite politik dan bisnis. Tanpa mengubah struktur ekonomi-politik ini, undang-undang antikorupsi hanya akan menjadi alat selektif untuk menghajar lawan politik sambil membiarkan sekutu tetap kebal.

Dengan kerangka ini, RUU Perampasan Aset dapat dibaca bukan sebagai solusi, melainkan sebagai bagian dari strategi legitimasi rezim yang sedang menghadapi tekanan publik akibat krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum.

Sejarah kontemporer penegakan hukum di Indonesia menyajikan pelajaran pahit mengenai bagaimana teks regulasi yang progresif selalu bertekuk lutut di hadapan jejaring kekuasaan yang lebih dalam. Kita tidak boleh lupa pada nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP). Sebagai lembaga superbody yang pernah memiliki legitimasi publik luar biasa dan taji hukum yang tajam, efektivitas PKP nyatanya runtuh seketika bukan karena kekurangan pasal, melainkan ketika relasi kuasa oligarkis bersepakat untuk menjinakkan lembaga tersebut melalui revisi undang-undang dan intervensi struktural.

Kasus KPK menjadi bukti empiris bahwa sekuat apa pun arsitektur kelembagaan atau seketat apa pun rumusan hukum dibuat, ia akan dengan mudah diampuntusi ketika mulai mengancam epistentrum kekuasaan yang mengendalikannya. Revisi UU KPK pada 2019, yang mengubah status pegawai menjadi ASN dan membentuk Dewan Pengawas, adalah contoh kasib bagaimana hukum digunakan secara strategis untuk melemahkan lembaga yang dianggap terlalu indepen-den.ejorjmal.

Untuk menilai potensi efektivitas dan risiko RUU Perampasan Aset, kita perlu melihat pengalaman negara lain yang telah menerapkan mekanisme serupa.

Di Amerika Serikat ada fakta efektivitas yang diwarnai penyalahgunaan. Negeri ini adalah salah satu yurisdiksi paling agresif dalam menerapkan civil asset forfeiture. Program ini memungkinkn penegak hukum menyita aset yang diduga terkait kejahatan tanpa perlu menuntut pemiliknya secara pidana. Data Departemen Kehakiman AS menunjukkan bahwa program ini telah menghasilkan miliaran dolar dalam penyiutan aset. Namun, pengalaman AS juga mengungkapkan risiko serius, yakni penyalahgunaan oleh Aparat. Banyak kasus di mana penyiutan dilakukan tanpa bukti kuat, terutama terhadap warga miskin dan minoritas, dengan dalih “perang melawan narkoba”.

Ditemukan adanya insentif ekonomi yang salah, sebab lembaga penegak hukum Amerika sering kali mendapat bagian dari hasil penyiutan, menciptakan insentif untuk melakukan penyiutan berlebihan (over-policing) demi pendapatan, bukan keadilan. Selain itu beban pembuktian terbalik yang sulit. Pemilik aset harus membuktikan bahwa aset mereka tidak terkait dengan secara praktis sangat sulit dan mahal.

Pengalaman AS mengajarkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan perlindungan hak asasi manusia, non-conviction based forfeiture dapat berubah menjadi alat perampasan bagi warga negara oleh negara itu sendiri.

Ingris dengan unexplained wealth rders (UWO) yang tumpul. Negeri ini memperkenalkan Unexplained Wealth Orders (UWO) pada 2018 sebagai bagian dari Proceeds of Crime Act 2002 untuk menyasar aset pejabat asing yang korup (Politically Exposed Persons/PEPs). Namun, efektivitas UWO sangat terbatas. Laporan tahunan 2024–2025 menunjukkan bahwa sejak diperkenalkan, UWO hanya berhasil digunakan dalam satu kasus besar terhadap PEP (kasus Zamira Hajiyeva, istri pejabat bank Azerbaijan). Secara umum, kurang dari dua lusin UWO telah diterbitkan dengan nilai pemulihan aset sekitar £22 juta—angka yang sangat kecil dibandingkan estimasi £90 miliar dana ilegal yang mengalir melalui Inggris setiap tahunnya.

Kegagalan UWO antara lain disebabkan oleh beban investigasi yang tinggi. Lembaga penegak hukum harus mengumpulkan bukti awal yang kuat sebelum mengajukan UWO. Selain biaya hukum yang besar, karena proses litigasi UWO sangat mahal dan memakan waktu, juga terdapat resistensi politik sebab ada kekha-watian bahwa UWO yang terlalu agresif akan mengganggu arus modal asing ke London.

Kasus Inggris menunjukkan bahwa bahkan di negara dengan lembaga penegak hukum yang relatif independen, instrumen perampasan aset tanpa pidana akan dapat menjadi tidak efektif jika tidak didukung oleh kemauan politik yang kuat dan sumber

daya yang memadai. Australia dengan model yang lebih terintegrasi berbasis non-conviction based forfeiture melalui Proceeds of Crime Act 2002 (Commonwealth) dan undang-undang serupa di tingkat negara bagian, menunjukkan perbedaan dengan AS. Australia karena lebih menekankan pada pendekatan terintegrasi dalam penyiutan aset dikaitkan dengan investigasi kejahatan yang lebih luas.

Meskipun demikian, Australia juga menghadapi kritik terkait beban pembuktian terbalik yang dapat melanggar hak asasi manusia. Namun, efektivitasnya dianggap lebih baik karena adanya koordinasi yang lebih baik antar-lembaga dan fokus pada kejahatan terorisanisr berskala besar.

Kekhawatiran bahwa UU Perampasan Aset akan bernasib sama, atau bahkan sejak awal didesain mandul, kian terkonfirmasi jika kita melihat dinamika pembaharuan drafnya yang berlangsung dalam lanskap politik hari ini. DPR menargetkan pengesahan RUU ini paling lambat pada 15 Desember 2026, dengan Komisi III DPR telah menggelar puluhan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan kunjungan kerja ke Eropa.

Namun, di balik target yang ambisius ini, terdapat kecurigaan mendalam terhadap substansi RUU yang sedang dibahas. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan lainnya telah memperkirakan RUU ini akan mengurangi substansi kriminal dalam draf versi DPR.

Pertama, Penghapusan Norma Illicit Enrichment. Ini adalah kemunduran paling fatal. Illicit enrichment (peningkatan kekayaan secara tidak sah) sejatinya adalah roh dari undang-undang ini untuk menyasar kekayaan pejabat publik yang tidak seimbang dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka. Tanpa illicit enrichment, undang-undang ini kehilangan daya hantamnya terhadap koruptor yang paling sulit dibuktikan secara pidana.

Kedua, Pembatasan Mekanisme Non-Conviction Based (NCB). Klausul-klausul yang mengatur perampasan aset tanpa pidana akan juga disinyalir dipersempit, misalnya dengan mensyaratkan bahwa pemilik aset harus terbukti terlibat tindak pidana tertentu terlebih dahulu, yang secara praktis akan mengurangi beban pembuktian ke standar pidana yang tinggi.

Ketiga, Fragmentasi Kewenangan. Draft RUU tidak secara jelas menyelesaikan masalah fragmentasi kewenangan antar-lembaga (Kejaksaan, KPK, Polri). Hal ini berisiko menciptakan tumpang tindih birokrasi baru dan ego sektoral dalam pengelolaan barang sitaan, yang pada akhirnya memperlambat proses pemulihan aset. Hasil “kesepakatan” antara DPR dan kelompok masyarakat sipil dalam beberapa RDPU lebih bersifat simbolis daripada substansial. DPR mendengarkan aspirasi publik, namun tidak menjamin bahwa masukan tersebut akan diakomodasi dalam draf final. Target pengesahan pada Desember 2026 lebih tampak sebagai upaya meredakan tekanan publik menjelang akhir masa jabatan daripada komitmen genuin untuk memberantas korupsi.

Sekalipun struktural ini terlihat jelas dalam refleksi beberapa megakorupsi mutakhir di Indonesia, khususnya di sektor ekstraktif seperti pertambangan komoditas timah dan konflik agraria skala masif di perkebunan kelapa sawit. Pada kasus-kasus tersebut, kita melihat jurang yang menganga lebar antara total kerugian ekologis dan perekonomian negara dengan realisasi aset yang berhasil disita dan dipulihkan.

Pada kasus timah Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia kehilangan lebih dari US\$2 miliar (nilai rata-rata TKA sekaligus) akibat penambangan dan penyelundupan timah ilegal di Bangka Belitung. Namun, aset yang berhasil disita dan diserahkan kepada PT Timah hanya bernilai sekitar US\$362–422 juta (sekitar Rp5,7–6,6 triliun).

Pada kasus sawit, khususnya dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO,

kerugian negara diperkirakan mencapai Rp40 triliun per tahun. Hingga April 2026, total aset yang berhasil dipulihkan melalui denda administratif dan penyiutan adalah sekitar Rp31,3 triliun—angka yang besar, namun masih jauh dari total kerugian yang terjadi selama hampir 20 tahun.

Pemulihan aset (asset recovery) di Indonesia menghadapi tiga kelemahan struktural laten: fragmentasi kewenangan antar-lembaga penegak hukum, ego sektoral dalam pengelolaan barang sitaan, dan budaya hukum yang masih gigitan beralih dari pemidanaan badan (in personam) ke pengejaran aset (in rem). Menambah regulasi baru di atas fondasi institusional yang masih korup dan terfragmentasi ini tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan hanya menciptakan tumpang tindih birokrasi baru.

Lebih jauh lagi, korupsi di Indonesia bukanlah sekadar deviasi perilaku individu penegak hukum, melainkan sebuah instrumen terstruktur dari sistem penghisapan dan kolonialitas internal yang telah mengakar. Di bawah sistem ini, kekayaan alam dikeruk habis-habisan dari daerah-daerah vasal yang kaya sumber daya, dialirkan melalui kanal-kanal politik formal, lalu didistribusikan untuk memelihara sistem politik elite di pusat yang mahalnya tidak masuk akal.

Studi menunjukkan bahwa biaya politik untuk memenangkan jabatan kepala daerah di Indonesia sangat tinggi, mencapai Rp20–30 miliar untuk tingkat bupati/walikota dan ratusan miliar untuk gubernur. Untuk membiayai kampanye ini, calon kepala daerah sering kali bergantung pada pendanaan dari oligarki dan korporasi, yang kemudian harus “dibalas” dengan kebijakan yang menguntungkan donor setelah mereka terpilih.journal.

Sistem pendanaan partai politik dan kampanye yang lemah dan tidak transparan membuat legislator enggan menaikan pajak atau menegakkan regulasi yang ketat terhadap industri yang menjadi sumber dana kampanye mereka. Peminta produk legislasi baru tanpa berani menggagat siapa yang mendanai partai politik, siapa yang mengontrol sirkulasi aparat, dan bagaimana surplus ekonomi dipusatkan secara tidak adil adalah bentuk nyata dari distraksi teknokratik. Ini adalah upaya mereudiksi krisis sistemik yang bersifat politis-ekonomis menjadi sekadar persoalan administratif-prosedural.

Pada akhirnya, pesimisme publik terhadap efektivitas UU Perampasan Aset berakar pada realitas empiris yang paling mendasar: Penghormatan terhadap supremasi hukum di negara ini berada pada titik nadir. Jangankan sebuah undang-undang yang hierarkinya berada di bawah konstitusi tertinggi seperti UUD 1945 saja kerap diakali, ditekuk, dan tidak dihormati oleh para pemangku kebijakan demi memuluskan syahwat kekuasaan jangka pendek atau melanggengkan dinasti politik.ejorjmal.

Jika hukum tertinggi saja bisa dikompromikan tanpa beban moral, konon lagi sebuah undang-undang baru yang pembahasannya dilakukan di ruang-ruang remang. Tanpa adanya radikalisasi gerakan sipil untuk mendisrupsi relasi kuasa yang menopang impunitas—termasuk reformasi sistem pendanaan politik dan pemilu—UU Perampasan Aset hanya akan menjadi instrumen tebang pilih berikutnya: gagah dalam teks akademik, tetapi impoten di bawah kendali jejaring kekuasaan.

Regulasi ini, dalam bentuknya yang sekarang, lebih mirip sebagai tektur kreatif distraktion—sebuah pertunjukan legislatif untuk menenangkan publik yang murka, sambil membiarkan struktur yang memproduksi korupsi tetap utuh. Jika kita ingin undang-undang ini bermakna, maka perjuangan bukan hanya pada pengesahannya, tetapi pada membongkar sistem oligarkis yang membuatnya tidak relevan sejak awal.

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (nBASIS).

AN & TKA Terintegrasi Pada SMA

Oleh Khairuddin, S.Pd., M.Pd.

Integrasi AN dan TKA adalah langkah maju dari sisi efisiensi teknis dan beban murid. Namun efisiensi ini menuntut kejernihan komunikasi publik yang jauh lebih besar dari sekadar regulasi teknis

Mulai 2026, wajah evaluasi pendidikan nasional berubah. Kemendikdasmen menyatukan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam satu rangkaian asesmen, termasuk jenjang SMA/MA/SMK sederajat, demi efisiensi: murid kelas akhir tak perlu lagi menjalani dua bentuk asesmen nasional terpisah. Namun sebagai praktisi yang berhadapan langsung dengan pelaksanaan teknis di lapangan, saya melihat sisi lain yang perlu dicermati, efisiensi ini berpotensi menimbulkan bias interpretasi bagi satuan pendidikan, orang tua, maupun publik.

Regulasi dan Teknis AN-TKA 2026

Dasar hukum pelaksanaan adalah Kepmendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA dan AN, diperkuat Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 atas Permendikbudistek Nomor 17 Tahun 2021 tentang AN dengan kerangka teknis SMA diatur lewat Peraturan Kepala BSKAP Nomor 045/H/AN/2025.

Poin krusialnya, integrasi ini hanya bersifat teknis, bukan penggabungan fungsi. Dulu TKA dilaksanakan di kelas XI sebagai sampel yang mewakili capaian satuan pendidikan, kini bergeser ke kelas XII, bersamaan AN dalam satu paket asesmen berbasis komputer. Regulasi menegaskan kedua instrumen berbeda aspek penilaian meski bersamaan waktunya, tetapi di lapangan, satu proses yang sama mudah dipersipkan sebagai satu asesmen yang sama.

TKA SMA diperuntukkan bagi murid kelas 12 SMA/MA sederajat, termasuk Paket C, dan kelas 13 SMK empat tahun, bersifat opsional, satu kali kesempatan, dan bukan syarat kelulusan. perubahan signifikan ada pada mekanisme penentuan peserta AN. Sejak tahun 2021 sampai 2025, sampel AN ditentukan pusat secara acak dan representatif. Sementara kini murid yang mendaftar TKA otomatis menjadi peserta AN, mengikuti pola partisipasi TKA tiap satuan pendidikan. Konsekuensinya tegas, satuan pendidikan tanpa peserta TKA otomatis tidak mengikuti AN, dan Rapor Pendidikan nya tidak terbit tahun berikutnya.

Pada 2025, TKA SMA masih terpisah

dari AN, seluruh mapel wajib diujikan dalam satu hari padat, persertanya kelas XI. Pada 2026, pelaksanaan dipecah beberapa hari, soal Matematika Wajib berkurang menjadi 25 butir dengan penekanan pada penilaian, mapel pilihan bertambah jadi 19 opsi, dan soal wajib Matematika-Bahasa Indonesia kini berfungsi ganda sebagai instrumen numerasi-literasi AN, sesuai prinsip “1 Instrumen, 2 Fungsi”.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya. AN dirancang mengevaluasi sistem, memotret mutu layanan pendidikan pada suatu satuan pendidikan secara agregat yang diperkaya Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar). Gambaran hasil AN berupa Indeks, bukan skor individu. Sebaliknya, TKA mengukur capaian akademik individu secara objektif dan terstandar, lepas dari nilai rapor satuan pendidikan yang standarnya berbeda antarsatuan pendidikan, dengan hasil berupa Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) yang melekat pada masing-masing murid. Dua tujuan ini, evaluasi sistem versus individu, berbeda arah meski lahir dari rahim soal yang sama.

Bagi satuan pendidikan, AN adalah instrumen pemetaan mutu dan

dasar kebijakan pembinaan. Bagi murid, TKA adalah tiket untuk perguruan tinggi; nilainya menjadi komponen pertimbangan dalam SNBP dan jalur mandiri PTN. Keduanya sama penting namun menyasar kepentingan berbeda, kelembagaan versus individu murid.

Potensi Bias Pengetahuan & Interpretasi

Bias pengetahuan di kalangan guru dan kepala satuan pendidikan. Dari beberapa diskusi dengan sesama kepala satuan pendidikan dan guru, tidak sedikit yang belum menyadari bahwa peserta TKA sekaligus peserta AN, sebagian masih mengira peserta AN adalah murid kelas XI seperti pola tahun lalu. Padahal sesuai Kepmendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026, peserta AN dan TKA adalah murid kelas XII yang didaftarkan satuan pendidikan (Satpen) dan otomatis mengikuti keduanya dalam satu paket. Jika Satpen memiliki 45 murid atau lebih, peserta AN-TKA minimal 45 orang. Jika kurang, minimal 85 persen dari total murid hingga seluruh populasi kelas XII.

Selama ini kita sering terjebak logika “TKA wajib diikuti murid eligible saja, yang belum berencana kuliah. Menurut saya, kita eligible ini berpotensi bias dan sebaiknya diabaikan dalam pendaftaran. Misal saja, di SMA Negeri 1 Paya Bakong, akreditasi B, jumlah murid eligible untuk SNBP hanya 40 orang, di bawah ambang minimal 45 peserta AN. Karena itu, Satpen harus memenuhi jumlah minimal peserta AN dengan mengesampingkan status eligible, meski akan terdapat risikonya baru yaitu murid yang tak berminat kuliah bisa tidak serius mengerjakan tes, menurunkan nilai rata-rata TKA sekaligus kebalikan data AN yang bermuara pada Rapor Pendidikan.

Perlu dicatat pula, sejumlah perguruan tinggi kini menjadikan SHTKA sebagai konsideran sekunder. Di Lhokseumawe misalnya, beberapa PTN meminta sertifikat TKA pada jalur SNBT maupun Mandiri, bahkan ada PTS yang mensyaratkannya, sehingga fungsi TKA berpotensi meluas melampaui SNBP semata. Karena itu, rangkaian empat hari AN-TKA, dari Bahasa Indonesia dan Survei Karakter hingga mata pelajaran pilihan, sebaiknya diikuti serius oleh seluruh peserta, sekalipun belum berencana kuliah, sebab hasilnya turut merepresentasikan satuan pendidikan dalam Rapor Pendidikan.

Bias metodologis dalam pengambilan sampel. Dalam kaidah penelitian, asesmen yang memotret mutu satuan pendidikan semestinya memakai sampel acak dari seluruh murid kelas XII, atau sampel bertingkat berdasarkan kemampuan kognitif (random stratified sample) yang tetap ditarik acak, agar hasilnya merepresentasikan populasi. Dengan mekanisme pendaf-taran saat ini, di mana peserta AN mengikuti siapa saja yang didaftarkan sebagai peserta TKA, unsur keacakan itu hilang. Tafsir Rapor Pendidikan berisiko dibangun dari kelompok murid “terpilih”, entah karena minat kuliah atau kepentingan satuan pendidikan memenuhi kuota minimal, bukan representasi acak populasi, berbeda dengan TKA yang sejak awal memang untuk kepentingan personal murid.

Kekhawatiran atas keseriusan peserta. Karena AN dan TKA melebur dalam satu rangkaian soal, murid yang berorientasi TKA bisa tidak serius mengerjakan bagian AN, atau sebaliknya, murid yang didaftarkan hanya untuk memenuhi kuota AN namun tak berniat kuliah bisa tidak serius mengerjakan bagian TKA. Jika keikutsertaan dipaksakan pada murid yang tak berminat kuliah, risikonya dua arah: nilai rata-rata TKA menurun, sekaligus mutu data AN tergerus, berdampak pada Rapor Pendidikan.

Konklusi Integrasi AN dan TKA adalah langkah maju dari sisi efisiensi teknis dan beban murid. Namun efisiensi ini me-

nuntut kejernihan komunikasi publik yang jauh lebih besar dari sekadar regulasi teknis. Kemendikdasmen perlu memastikan sosialisasi tegas dan merata hingga ke kepala satuan pendidikan dan guru di daerah, bahwa satu instrumen asesmen tidak berarti satu makna hasil, bahwa logika eligible tidak lagi relevan dalam pendaftaran, dan bahwa hilangnya keacakan sampel AN adalah konsekuensi metodologis yang perlu diwaspadai. Jika tidak, kita berisiko mengulang kesalahan lama: menjadikan asesmen yang dirancang untuk kepentingan murid dan sistem pendidikan justru berubah menjadi sumber kebingungan teknis, tekanan kuota, dan tafsir yang bias dari niat awal regulasinya.

Penulis adalah Dewan Kehormatan Ikatan Guru Indonesia Kepala SMA Negeri 1 Paya Bakong.

Pengumuman

Redaksi menerima karya tulis berupa artikel/opini, dan surat pembaca. Kirim ke e-mail: opiniwaspada@yahoo.com. Artikel yang dikirim orisinal dan belum pernah dipublikasi di media manapun. Panjang artikel 5-7 ribu karakter dilengkapi biodata singkat (pendidikan dan pekerjaan) dan kartu pengenalan (KTP atau SIM dll) penulis. Terhitung mulai edisi 1 April 2022, tulisan yang dimuat tidak disediakan honor tulisan.

SUDUT BATUAH

*Perempuan Prancis tolak usulan larangan berhijab -Awak dukung, he...he...he

*Erupsi Sinabung tak berdampak pada lahan pertanian - Masih amanlah distribusi sayur mayur

* DPRD: Awasi anggaran Rp100 miliar untuk infrastruktur - Maksudnya biar tak salah masuk

Wak Doel



Antara
PETUGAS BPBD melakukan upaya pemadaman api di salah satu lokasi kebakaran lahan di Kabupaten Aceh Barat. Hingga Sabtu (5/9/2026) luas lahan yang sudah terbakar akibat bencana kebakaran hutan dan lahan di empat kecamatan di wilayah ini sudah mencapai seluas 11,5 Ha dari sebelumnya seluas 9,5 Ha.

Kebakaran Lahan Di Aceh Barat Meluas

ACEH BARAT (WASPADA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga saat ini mencapai 11,5 Hektare (Ha) dari sebelumnya seluas 9,5 Ha.

“Upaya pemadaman masih terus kita lakukan hingga saat ini, dengan harapan seluruh lokasi kebakaran lahan dapat dipadamkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat, Dharmawan, Sabtu.

Ia menjelaskan, hingga saat ini pihaknya bersama tim gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pemantauan intensif di lokasi kejadian. Ada pun wilayah terdampak musibah kebakaran lahan diantaranya meliputi Kecamatan Johan Pahlawan di Gampong Blang Beuran-dang seluas 3 hektare, Kecamatan Samatiga di Gampong Mesjid Baro seluas 5 hektare.

Kemudian di Kecamatan Kaway XVI berlokasi di Gampong Simpang seluas 2 hektare, serta Kecamatan Woyla di Gampong Aron Tunong seluas kurang

lebih 1,5 hektare.

Dharmawan menjelaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Aceh Barat diterjunkan ke lokasi terdampak melakukan operasi pemadaman bersama unsur TNI, Polri, KPH IV Aceh, dan masyarakat setempat.

Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Kerugian yang ditimbulkan sejauh ini adalah rusaknya vegetasi tanaman serta berpotensi mengganggu pernapasan warga di sekitar lokasi,” jelasnya.

Dharmawan menjelaskan, upaya pemadaman di lapangan menghadapi sejumlah kendala teknis, di antaranya sumber air yang sangat terbatas di wilayah

Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dan hembusan angin kencang, serta sulitnya akses jalan menuju titik api, terutama di Gampong Simpang, Kecamatan Kaway XVI, serta wilayah Samatiga dan Johan Pahlawan.

Untuk menunjang operasional, tim gabungan menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana pendukung, antara lain 1 unit armada D-Max, 1 unit ATV, 1 unit drone pemantau, serta 2 unit mesin pemadam air beserta perlengkapan selang. BPBD Aceh Barat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, demikian Dharmawan. *(ant)*

Pemkab Aceh Timur Percepat Realisasi Tambahan TKD

ACEH TIMUR (WASPADA) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur mempercepat realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,637 miliar digunakan untuk membangun infrastruktur.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur Rizam di Aceh Timur, Sabtu, mengatakan nilai TKD tersebut diterima sesuai Keputusan Menteri Keuangan.

“TKD tersebut digunakan untuk pembangunan, di antaranya Jembatan Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Pereulak, menjadi kegiatan terbesar yang dibiayai melalui tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA),” katanya.

Ia menyebutkan tambahan

TKD tersebut terdiri atas tambahan DOKA sebesar Rp1,454 miliar dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp183,353 juta. Namun, kata dia, realisasi keseluruhan tambahan TKD saat ini baru mencapai Rp90,165 juta atau sekitar 5,51 persen.

Menurut Rizam, rendahnya realisasi tersebut bukan karena kegiatan tidak berjalan, melainkan sebagian besar anggaran masih berada dalam tahapan pengadaan dan akan segera masuk ke tahap pelaksanaan.

“Untuk kegiatan yang sudah melalui proses pengadaan, tahapan selanjutnya tinggal pelaksanaan. Kegiatan terbesar di antaranya adalah pembangunan Jembatan Seumanah Jaya,” kata Rizam.

Ia menjelaskan dari tambahan DOKA sebesar Rp1,454 miliar, porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan Jembatan Seumanah Jaya dengan anggaran mencapai sekitar Rp1,381 miliar.

Saat ini, proyek tersebut masih dalam proses pengadaan. Rencananya, kontrak pekerjaan dilakukan pada pekan mendatang dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama kurang lebih enam bulan.

Dengan dimulainya kontrak tersebut, pembangunan jembatan diharapkan dapat segera berjalan serta meningkatkan penyerapan tambahan DOKA Kabupaten Aceh Timur.

Selain pembangunan jembatan, sebagian tambahan DOKA juga dialokasikan untuk Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh

Timur sebesar Rp72,7 juta. Alokasi anggaran tersebut untuk pengadaaan masjid.

“Dari total tambahan DOKA Rp1,454 miliar, baru terealisasi Rp71,83 juta atau 4,54 persen. Sementara, sisanya masih dalam proses pengadaan melalui sistem pengadaan pemerintah,” kata Rizam.

“Sebagian besar kegiatan memang masih dalam proses pengadaan. Setelah proses itu selesai dan kegiatan dikontrakkan, maka tinggal masuk ke tahap pelaksanaan,” katanya.

Sedangkan tambahan DBHCHT Rp183,35 juta juga telah dialokasikan ke sejumlah organisasi perangkat daerah untuk mendukung beberapa kegiatan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Aceh Timur mendapat alokasi dengan realisasi Rp18,3 juta atau 10 persen.

Selain Satpol PP, dana DBHCHT juga dialokasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp73 juta. Dana tersebut untuk pengadaan mobil lima puskesmas. Kemudian, Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Timur mendapat alokasi Rp91,6 juta untuk berbagai kegiatan, di antaranya budidaya kakao dan lainnya.

Rizam mengatakan seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat segera direalisasikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. BPKD terus memantau perkembangan pelaksanaan anggaran, terutama terhadap kegiatan yang kini telah memasuki proses pengadaan dan persiapan kontrak. “Dengan tambahan tersebut, Pemkab Aceh Timur menargetkan seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan hingga akhir tahun 2026,” kata Rizam. *(ant)*



ARSIP foto - Jembatan rusak akibat banjir di Ranto Pereulak, Kabupaten Aceh Timur.

DPRK Dan Pemko Langsa Sepakat KUA-PPAS APBK 2027 Disahkan

LANGSA (WASPADA): Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) bersama Pemerintah Kota (Pemko) Langsa menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK 2027, sekaligus mengesahkan Perubahan KUA-PPAS APBK 2026.

Kesepakatan itu diambil dalam dua Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 dihari 20 dari 25 anggota dewan, di Ruang Paripurna DPRK Langsa, Jumat (4/9/2026) sore.

Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 dengan Agenda Laporan Pe-

nyampaian Laporan Panitia Anggaran DPRK Langsa Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Langsa Tahun Anggaran 2027 dipimpin Wakil Ketua I DPRK Burhansyah, SH dihadiri Ketua DPRK Melvita Sari, SAB, Wakil Ketua II Noma Khairil, para anggota, dan Sekwan Gunawan Abdillah, S.STP, M.SP.

Laporan Panitia Anggaran dibacakan juru bicara dr. Febri Haska Putra.

Sementara Rapat ke II, Laporan Panitia Anggaran DPRK Langsa terhadap Rancangan Perubahan KUA serta Rancangan

Perubahan PPAS APBK Langsa Tahun Anggaran 2026 dipimpin Melvita Sari, SAB.

Wali Kota Langsa Jeffrey Sentana S Putra, SE dalam sambutannya, menyampaikan atas nama Pemko Langsa menggunakan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK yang telah bekerja keras bersama pemerintah daerah dalam membahas dan menyempurnakan rancangan KUA dan PPAS.

Ia juga, menjelaskan bahwa KUA APBK 2027 disusun sebagai acuan kerangka kerja bagi Pemerintah Kota Langsa dalam merumuskan dan menyusun PPAS

Tahun Anggaran 2027.

Selanjutnya, PPAS menjadi acuan dalam menetapkan plafon anggaran terhadap program dan kegiatan yang menjadi agenda pembangunan Kota Langsa pada Tahun 2027, sekaligus menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran.

Ia berharap pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan legislatif dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang objektif dan realistis, dengan mengutamakan program yang benar-benar strategis serta memberikan manfaat bagi masyarakat. *(b13)*

MAA Langsa Ajak Masyarakat Pertahankan Kearifan Lokal

LANGSA (WASPADA): Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa, Drs H Mursyidin Budiman, mengajak Klinik Spesialis Mata berkolaborasi menjaga dan melestarikan adat serta kearifan lokal masyarakat Aceh khususnya di Kota Langsa.

Ajakan tersebut disampaikan Mursyidin saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Klinik Spesialis Mata Kota Langsa, Jumat (4/9) disambut Pimpinan Klinik dr Jaka Madda, di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan tersebut, Mursyidin menyampaikan pentingnya membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan lembaga dalam upaya mempertahankan nilai-nilai adat dan kearifan lokal sebagai warisan indatu.

Menurutnya, pelestarian adat bukan semata-mata menjadi tanggung jawab MAA, tetapi membutuhkan kepedulian dan dukungan seluruh komponen masyarakat. Nilai-nilai adat dan kearifan lokal Aceh diharapkan tetap hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun masyarakat terus menghadapi perkembangan zaman.

“MAA Kota Langsa terus berupaya mengajak

berbagai pihak untuk bersama-sama menjaga adat dan kearifan lokal. Kita berharap nilai-nilai warisan indatu ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi tetap hidup dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat,” ujar Mursyidin.

Sementara itu, dr Jaka Madda menyampaikan antusiasmenya atas kunjungan Ketua MAA pihaknya siap mendukung program-program, terutama berkaitan dengan upaya menjaga adat, budaya dan kearifan lokal sebagai warisan indatu masyarakat Aceh.

Selain itu, dr Jaka juga menyampaikan bahwa Klinik Spesialis Mata Kota Langsa memiliki program pengabdian kepada masyarakat berupa pemeriksaan mata secara gratis pada momen-momen tertentu.

“Untuk pemeriksaan mata gratis, kita memang tidak bisa melakukannya setiap hari karena keterbatasan tenaga dokter. Namun, pada momen tertentu kita memiliki program pengabdian masyarakat berupa pemeriksaan mata gratis,” jelas dr Jaka. *(b12)*



Waspada/Ibnu Sa'dan
KETUA MAA Kota Langsa Drs H Mursyidin Budiman berbincang dengan Pimpinan Klinik Spesialis Mata Kota Langsa dr Jaka Madda di ruang kerjanya, Jumat (4/9). Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam menjaga adat dan kearifan lokal sebagai warisan indatu masyarakat Aceh.

ICMI Harus Menjadi Tumpuan Kemajuan Aceh

ACEH BESAR (WASPADA): Ketua MPW Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Aceh Dr Taqwaddin, menegaskan bahwa ICMI harus mampu menjadi kekuatan intelektual sekaligus tumpuan masyarakat dalam menggerakkan kemajuan Aceh di berbagai bidang.

Hal itu disampaikan Taqwaddin dalam sambutannya pada acara pelantikan Pengurus Organisasi Daerah (Orda) ICMI Aceh Besar periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Mujimulia, Sabtu, (5/9/26).

Menurut Taqwaddin, ICMI merupakan wadah berhimpunnya para cendekiawan dan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman serta kepedulian terhadap pembangunan daerah.

“Orang-orang ICMI adalah cendekiawan tempat berhimpun para tokoh dan ahli dalam berbagai bidang keilmuan, praktisi profesional, para ulama, aktivis dan para pemuda,” ujarnya.

Karena itu, kata Taqwaddin, keberadaan ICMI tidak boleh berhenti sebagai organisasi tempat berhimpun para intelektual. ICMI harus mampu menerjemahkan kapasitas keilmuan dan kepakaran anggotanya menjadi kekuatan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita diharapkan menjadi tumpuan yang dapat menggerakkan kemajuan dalam berbagai bidang,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Taqwaddin juga menyampaikan empat kriteria yang menurutnya penting dimiliki tokoh dan pemimpin Aceh. Ia merumuskannya melalui filosofi lokal Aceh, yakni tuha, tuho, teupeu dan teupat.

Pertama, tuha, yakni matang secara usia dan pengalaman. Setidaknya, seorang tokoh atau

pemimpin memiliki usia di atas 40 tahun sehingga diharapkan telah memiliki kematangan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan masyarakat.

Kedua, tuho, yakni mengetahui arah yang hendak dituju. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki pengalaman, tetapi juga harus memiliki visi dan mengetahui ke mana masyarakat akan dibawa.

Ketiga, teupeu, yaitu memiliki pengetahuan yang luas. Seorang pemimpin mungkin tidak harus mengetahui segala sesuatu secara mendalam, tetapi harus mengetahui banyak hal dan mampu memahami berbagai persoalan yang melibatkan banyak orang serta berbagai pihak.

Keempat, teupat, yakni tepat dalam bersikap dan bertindak. Seorang pemimpin harus jujur, mengikuti aturan, menjunjung keputusan dan kearifan serta mampu menjaga integritas.

Menurut Taqwaddin, keempat karakter tersebut penting bagi siapa saja yang ingin mengambil peran dalam pembangunan Aceh membutuhkan kematangan, arah yang jelas, wawasan luas dan integritas.

Taqwaddin juga memberikan perhatian khusus kepada ICMI Orda Aceh Besar yang baru dilantik. Ia berharap ICMI Aceh Besar dapat mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah dan menjadi salah satu kekuatan penting bersama organisasi daerah ICMI lainnya.

“ICMI Orda Aceh Besar saya rasa seperti Orwil. Jadi, ICMI Aceh Besar ini harus hebat. Bersama Orda Banda Aceh, Sabang dan daerah lainnya menjadi penyangga yang kuat untuk kemajuan Aceh,” katanya. *(b02)*



Waspada/ist
KETUA ICMI Aceh Taqwaddin saat melantik Pengurus Organisasi Daerah (Orda) ICMI Aceh Besar periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Prof Dr. Mujimulia, Sabtu, (5/9/26).

Sambut Milad BKPRMI Aceh Timur Gotong Royong

IDI (WASPADA) Rangkaian Milad ke-49 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) melakukan kegiatan gotong royong dipusatkan di Masjid Syuhada, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Minggu (6/9).

Ketua Umum DPD BKPRMI Aceh Timur, H. Muhammad Ishak, melalui Sekretarisnya, Ismuhadi mengatakan, kegiatan itu menjadi agenda rutin pengurus setiap akhir pekan. Namun dalam rangkaian Milad Tahun 2026 pihaknya sengaja menjadwalkan lokasi di Pusat Ibukota Pemkab

Aceh Timur yakni Masjid Besar Syuhada Idi Rayeuk, sehingga warga dan masyarakat bisa bergabung dengan para kader.

“Bukan hanya kader, namun sejumlah warga dan remaja masjid dari beberapa masjid lainnya ikut bergabung dalam kegiatan ini. Mereka secara berangsur akan kita masukkan ke dalam struktur kepengurusan BKPRMI Kabupaten Aceh Timur atau bergabung di sejumlah DPK BKPRMI sesuai alamat domisili,” ujar Ismuhadi.

Dosen Bumi Persada Lhok-seumawe ini juga



Waspada/Muhammad Ishak
PENGURUS BKPRMI Aceh Timur, berfoto bersama usai kegiatan bersih-bersih masjid di Masjid Syuhada, Idi Rayeuk, Aceh Timur, Minggu (6/9).

mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur atas dukungan-nya dalam mengembangkan BKPRMI di seluruh pelosok. “Bahkan tahun ini kita akan menggelar Festival Anak Saleh Indonesia (FASI) tingkat kecamatan di 24 titik dan FASI Kabupaten Aceh Timur bersamaan dengan Puncak HUT Aceh Timur Tahun 2026,” ujar Ismuhadi.

“Tanggung jawab membersihkan masjid jangan hanya dibebankan ke marbot atau bilal, tapi ini menjadi kewajiban kita dalam menjaga dan memelihara kesucian masjid. Jika bukan sekurang-kapain lagi, kalau bukan kita siapa lagi,” kata Ismuhadi. *(b11)*

Munculkan Bibit Atlet Potensial

Turnamen Catur SIWO PWI-STOK Bina Guna Sukses

MEDAN (Waspada): Turnamen Catur Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Sumut - STOK Bina Guna Medan berhasil memunculkan sejumlah bibit atlet potensial.

Turnamen tersebut ditutup Ketua PWI Sumut, H Farianda Putra Sinik, di Aula STOK Bina Guna, Jl. Alumunium Medan, Sabtu (5/9) sore. Penutupan di-rangkaian dengan pengalungan medali serta penyerahan piagam dan hadiah kepada para juara masing-masing kategori.

Turut hadir saat penutupan Ketua Percasi Medan Immanuel Marudut Simatupang, Ketua STOK Bina Guna Medan Dr dr Hj Liliana Puspa Sari Spd MKes diwakili staf, Dr Ramadan Ginting, Sekretaris PWI Sumut SR Hamonangan Panggabean, Ketua SIWO PWI Sumut Johny Ramadhan Silalahi, Ketua Panitia Pujianto serta para wali dan orang tua peserta pelajar.

Farianda mengatakan pembinaan atlet harus dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan. "Harus ada pembinaan berjenjang, tidak ada yang instan. Hari ini kita melihat banyak muncul bibit

atlet potensial," ujar Farianda.

Ia mengucapkan selamat kepada para juara dan mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti turnamen. Khusus kategori wartawan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan PWI Sumut menuju Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 di Lampung.

Diakui, turnamen serupa perlu kembali digelar dengan peserta yang lebih banyak dan cakupan yang lebih besar. "Tahun depan kita buat lagi. Semua harus ikut lagi. Kepada anak-anak, berlatih terus agar bisa juara," ujarnya.

Juara kategori SMA putra diraih Ahmad Rony Nasution dari MAN 2 Model Medan. Kemenangan ini menjadi modal penting baginya untuk event yang lebih tinggi. Dia memiliki impian dapat bertanding hingga ke luar negeri serta memperoleh beasiswa.

Gelar ini juga sekaligus menambah daftar prestasinya di

catur. Dia pernah meraih medali emas Kejurprov 2025 dan Kejurprov 2026 di Samosir meraih medali perak.

Juara kategori putri, Alma Fatiha Ghassani dari SMP Nakamura School Medan mengaku hasil pertandingan tidak lebih penting dari pengalaman bertanding hingga evaluasi hasil latihan.

Alma mengaku menghadapi sejumlah lawan sulit, termasuk Jedidiah Saputra. Dalam pertandingan ini, ia sempat kehabisan



KETUA PWI Sumut H Farianda Putra Sinik pose bersama para juara dan panitia Turnamen Catur Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Sumut - STOK Bina Guna Medan.

waktu sebelum akhirnya memanfaatkan kesalahan lawan.

"Jedidiah bermain bagus. Saya sempat kehabisan waktu.

Saya main lama, enggak bisa main cepat. Kemudian menang

pion dan dia buat blunder," ujar Ala. **(m18)**

Wartawan Waspada Juara, Sapu Bersih 5 Babak

MEDAN (Waspada): Wartawan Harian Waspada, David Swayana **(foto 3 kanan)**, tampil sebagai juara kategori wartawan pada Turnamen Catur Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Sumut - STOK Bina Guna Medan Piala Ketua PWI Sumut di Aula STOK Bina Guna Medan, Sabtu (5/9).

David menyapu bersih lima babak dengan lima kemenangan dan meraih poin maksimal 5. Ia mengungguli Hamdani Nasution dan SR Hamonangan Panggabean yang sama-sama mengoleksi 4 poin serta Maju Manalu

dengan 3,5 poin.

David mengaku tidak menyangka bisa menjadi juara karena target awalnya hanya menembus semifinal (4 besar). Apalagi ini kali pertama dia ikut turnamen resmi usai banting cabor dari sepakbola (futsal).

"Ganti cabor karena kan ada regenerasi. Jadi main catur. Minatnya menang di catur. Temyata bisa juara," ujar David.

Persiapannya menghadapi turnamen berlangsung singkat, tidak sampai satu bulan, dengan menjalani latihan secara online

dan offline. Menurutny, seluruh pertandingan berlangsung berat karena harus menghadapi lawan-lawan dengan kemampuan dan pengalaman yang baik.

Redaktur Halaman Sumatera Utara itu mengatakan motivasi mengikuti turnamen semakin kuat karena memang memiliki minat terhadap catur dan ingin mempersiapkan diri menuju Porwanas 2027 di Lampung.

Ia menyebut dukungan keluarga, khususnya istri, turut menjadi motivasi selama bertanding. Dari lima babak yang dijalani,

David juga menghadapi pemain seperti Maju Manalu dan Syafaruddin yang memiliki pengalaman sebagai atlet Porwanas.

David menyatakan siap jika dipercaya mewakili Sumatera Utara pada Porwanas 2027. "Pastinya sangat siap. Persiapan serius lagi. Target bisa raih medali," katanya.

Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik mengapresiasi pelaksanaan Turnamen Catur SIWO PWI Sumut - STOK Bina Guna. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah

menyuskeskan kegiatan tersebut.

Menurut Farianda, hasil turnamen akan menjadi bagian dari persiapan PWI Sumut menghadapi Porwanas 2027 di Lampung. Turnamen ini sekaligus menjadi sarana untuk menyeleksi atlet catur terbaik dari kalangan wartawan.

"PWI Sumut menargetkan hasil terbaik pada Porwanas 2027. Atlet yang terpilih nantinya akan dipersiapkan secara serius agar mampu bersaing dan memberikan prestasi terbaik bagi Sumatera Utara," ujar Farianda. **(m18)**



JARINGAN sepeda motor Honda menghadirkan berbagai kegiatan spesial bersama konsumen dalam menyambut Hari Pelanggan Nasional.

MEDAN (Waspada): Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, PT Astra Honda Motor (AHM) bersama 29 jaringan main dealer sepeda motor Honda di seluruh Indonesia turut memeriahkan dengan beragam aktivitas apresiasi bersama konsumen.

Kegiatan memanjakan konsumen ini akan berlangsung hingga akhir September dengan melibatkan ribuan pelanggan melalui aktivitas seru yang dapat

Hari Pelanggan Nasional 2026, Honda Hadirkan Kejutan Spesial

memberikan pengalaman yang berkesan dan personal.

Melalui tema "Satu Hati, Menemani Setiap Langkah," lebih dari 1.600 dealer sepeda motor Honda menghadirkan berbagai kegiatan interaktif untuk merayakan Hari Pelanggan Nasional bersama konsumen.

Kegiatan ini beberapa diantaranya dilakukan bersama dengan jajaran manajemen AHM maupun main dealer, seperti pengantaran unit baru maupun service visit. Dalam kesempatan lainnya, manajemen AHM dan jaringan juga melakukan aktivitas rolling city bersama dengan customer loyal menggunakan jajaran sepeda motor Honda bermesin 160cc.

Semakin mempererat kedekatan dengan konsumen, Honda juga menghadirkan kegiatan gathering konsumen di berbagai daerah dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional. Dalam momen ini juga dilakukan sosialisasi terkait customer loyalty, dimana konsumen yang telah melakukan transaksi dalam nominal tertentu dapat memiliki keuntungan yang telah ditentukan seperti kemudahan layanan maupun fasilitas.

General Manager Honda Customer Care Center AHM, Antok Yuniarso, mengatakan konsumen merupakan inspirasi dalam meningkatkan kualitas produk maupun layanan. Dalam momen Hari Pelanggan Nasional, AHM bersama dengan jaringan memberikan beragam aktivitas menarik sebagai bentuk komitmen Satu Hati untuk tumbuh positif bersama konsumen.

"Kepercayaan konsumen menjadi landasan bagi kami untuk terus meningkatkan

kualitas layanan dan menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan dalam mendukung mobilitas produktif masyarakat. Melalui momentum Hari Pelanggan Nasional, kami bersama seluruh jaringan sepeda motor Honda berkomitmen memperkuat kedekatan dengan konsumen melalui layanan yang semakin responsif, personal, dan memberikan pengalaman positif dalam setiap interaksi bersama sepeda motor Honda," ujar Antok, Minggu (6/9).

Honda Customer Care Center Manager PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara, Sahat Josua Silalahi, mengatakan momentum Hari Pelanggan Nasional menjadi kesempatan bagi Honda untuk semakin dekat dengan masyarakat Sumatera Utara sekaligus memberikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Honda.

"Bagi kami, setiap konsumen Honda termasuk di Sumatera Utara memiliki arti penting dalam perjalanan untuk terus memberikan produk, layanan, dan pengalaman terbaik. Melalui semangat Satu Hati, kami ingin memastikan apresiasi kepada konsumen tidak hanya hadir dalam bentuk kejutan dan promo, tetapi juga melalui pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan nyaman di seluruh jaringan Honda di Sumatera Utara," ujarnya.

Selain aktivitas seru bersama konsumen, dalam perayaan Hari Pelanggan Nasional ini konsumen juga memiliki kesempatan mendapatkan promo menarik dari dealer sepeda motor Honda. Dimulai dari diskon pembelian produk hingga diskon service khusus di bulan September. **(rel)**

Aceh

PLN Aceh Bangun Jaringan SUTT Sepanjang 140 Km

BANDA ACEH (WASPADA) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP Sumbagut) menargetkan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sepanjang 140 Kilometer (Km) di wilayah Pantai Barat-Selatan Aceh, yakni dari Tapaktuan hingga Subulussalam, guna memperkuat keandalan kelistrikan.

"Proyek tersebut merupakan wujud nyata implementasi dari Rencana Penguatan Infrastruktur Kelistrikan Aceh sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034," kata Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PLN UID Aceh, Zulfan M. Jamil di Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan, proyek SUTT di kawasan Pantai Barat-Selatan Aceh tersebut saat ini tengah memasuki proses pembebasan lahan. Setelah tahapan tersebut tuntas, pekerjaan akan langsung berlanjut ke tahap konstruksi.

Ia mengatakan sesuai dengan grand design RUPTL 2025-2034, pembangunan ini adalah langkah strategis kelistrikan di ujung barat Indonesia. Dengan terhubungnya SUTT dari Tapaktuan di Aceh Selatan ke Subulussalam, distribusi listrik akan terkoneksi dari dua jalur utama, jika terjadi gangguan di salah satu sistem yang



ILUSTRASI - Infrastruktur SUTT 150kV.

ada di Pantai Timur, pasokan listrik dapat di-cover melalui jaringan Pantai Barat-Selatan Aceh.

PLN juga menambahkan bahwa pembangunan jaringan SUTT di wilayah ini menjadi bagian dari upaya penguatan mitigasi dari insiden bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 yang merobohkan 14 tower SUTT dan mengakibatkan gangguan listrik di Tanah Rencong.

Pihaknya sangat menyambut baik progres pembangunan infrastruktur strategis tersebut, karena dampak positifnya yang akan langsung dirasakan oleh pelanggan.

"Kehadiran SUTT 150 KV ini

akan memperkuat keandalan listrik di Aceh, karena jika terhubung jaringan transmisi Aceh jadi looping (terhubung melingkar) dari pantai timur bisa dan juga dari Pantai Barat-Selatan Aceh," katanya.

Zulfan menambahkan bahwa sinergi pembangunan ini sangat dinantikan untuk memastikan masyarakat Aceh tidak lagi mengalami pemadaman meluas saat terjadi cuaca ekstrem atau gangguan di salah satu sisi jalur transmisi. "Kami berharap seluruh proses dan tahapan dapat berjalan lancar sehingga kehadiran SUTT ini akan meningkatkan keandalan listrik di Tanah Rencong," katanya.

PLN mengajak semua pihak

dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan SUTT di wilayah Pantai Barat-Selatan Aceh tersebut. Infrastruktur kelistrikan yang tangguh diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Adapun total daya yang dimiliki sistem kelistrikan Aceh saat ini tergolong sangat aman, yakni sebesar 1.049 MW dengan beban puncak mencapai 638 MW. Dengan kondisi tersebut, sistem kelistrikan Aceh memiliki cadangan daya (reserve margin) sebesar 411 MW. **(ant)**

Saat Menyeberangi Sungai Warga Peureulak Meninggal Diterkam Buaya

IDI (WASPADA): Salah seorang petani diterkam buaya di sungai DK1 Desa Peunaron Baru, Peureulak, Aceh Timur ditemukan meninggal dunia.

Korban bernama Muhammad Dani, asal Gampong Tumpeun, Peureulak Barat, Aceh Timur diterkam buaya saat hendak menyeberangi sungai menggunakan sampan dayung di sungai DK1, Jumat (4/9) sekira pukul 12.00.

"Awalnya korban menghilang setelah sampannya diseruduk buaya hingga tergulung. Warga yang mengetahui kejadian mencoba melakukan pencarian hingga malam hari, tapi hasilnya nihil," kata Agus Kiswanto, tokoh pemuda Peuna-ron, Minggu (6/9).

"Setelah berjam-jam dilakukan pencarian, akhirnya tim gabungan dibentuk muspika berhasil menemukan korban dalam kondisi tidak bemyawa, Sabtu (5/9) sekira pukul 14.00," tutur Agus Kuswanto.



TIM gabungan membawa jenazah korban ke Puskesmas Peunaron, Aceh Timur, Sabtu (5/9) sore.

Camat Peunaron, Hasdiansyah Muliadi, membenarkan adanya warga Peureulak Barat, diterkam buaya di wilayahnya saat menyeberangi sungai. "Korban awalnya hendak ke kebun sawit seperti biasa menggunakan sampan menyeberangi sungai," sebutnya. **(b11)**

Tiga Bahasa Pulau Simeulue Jadi Warisan Budaya Nasional

SIMEULUE (WASPADA) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, menyatakan Kementerian Kebudayaan menetapkan tiga bahasa daerah di kabupaten kepulauan tersebut sebagai warisan budaya tak benda (WTB).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue Zulfatah di Simeulue, Kamis, mengatakan tiga bahasa daerah tersebut yakni Bahasa Devayan, Bahasa Sigulai dan Bahan Simolol. "Tiga bahasa ini merupakan bahasa asli penduduk Pulau Simeulue. Kini, bahasa tersebut resmi tercatat menjadi warisan budaya tak benda," kata Zulfatah.

Selain tiga bahasa tersebut, kata dia, saat ini Pemerintah Kabupaten Simeulue sedang memproses pengajuan satu bahasa asli Simeulue lainnya,

yakni Bahasa Lekon untuk bisa ditetapkan menjadi bahasa warisan tak benda.

"Ada satu bahasa lagi yang diajukan menjadi bahasa warisan budaya tak benda, yakni Bahasa Lekon. Kami berharap Bahasa Lekon ditetapkan sebagai bahasa warisan tak benda," katanya.

Zulfatah mengatakan pemerintah kabupaten juga mengupayakan tiga bahasa daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya nasional itu untuk masuk dalam kurikulum dan menjadi pelajaran di sekolah.

Tujuannya masuk kurikulum, kata dia, sebagai upaya melestarikan bahasa daerah tersebut, sehingga bahasa asli masyarakat Pulau Simeulue lestari dan dapat diwariskan hingga anak cucu. **(ant)**



ARSIP foto - Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Simeulue Asmanuddin (kanan) memperlihatkan sertifikat warisan tak benda Bahasa Devayan di Banda Aceh.

RSUD Langsa Sediakan Air Minum Gratis

LANGSA (WASPADA): Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien dan keluarganya. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas air minum Reverse Osmosis (RO) gratis.

Fasilitas air minum gratis tersebut ditempatkan di lingkungan RSUD Langsa dapat dimanfaatkan keluarga pasien selama menjalani perawatan maupun mendampingi anggota

keluarganya di rumah sakit.

Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa, Drs H Mursyidin Budiman, Kamis (3/9), memberikan apresiasi terhadap kebijakan pimpinan RSUD Langsa yang menyediakan air minum gratis.

Menurutnya, kebijakan itu merupakan bentuk kepedulian rumah sakit terhadap pasien dan keluarga pasien, sekaligus menunjukkan adanya upaya meningkatkan kualitas pelayanan

publik.

"Ini kebijakan yang sangat baik dan patut diapresiasi. Keluarga pasien tentu sangat terbantu dengan tersedianya air minum yang bisa langsung dikonsumsi secara gratis," ujar Mursyidin.

Ia mengatakan, pelayanan rumah sakit tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga bagaimana memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada pasien serta keluarganya selama

berada di lingkungan rumah sakit.

Mursyidin berharap fasilitas tersebut dapat terus dipertahankan dan dirawat dengan baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

"Hal-hal sederhana seperti penyediaan air minum gratis ini sangat berarti bagi masyarakat. Apalagi keluarga pasien terkadang harus berada berjam-jam bahkan berhari-hari di rumah sakit," katanya. **(b12)**

Antara

Lolos Piala Asia, Timnas U-20 Jangan Cepat Puas

VIENTIANE, Laos (Waspada): Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengingatkan Timnas Indonesia U-20 agar tidak cepat merasa puas setelah memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-20 tahun 2027 di China. Indonesia lolos setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada pertandingan terakhir Grup H kualifikasi di Lao National Stadium KM16, Laos, Minggu (6/9). Dua gol kemenangan Garuda Muda dicetak Theodore Evan Leeming menit ke-28 dan Amar Brkic menit ke-90+3. Hasil tersebut membuat Indonesia mengakhiri kualifikasi sebagai juara Grup H dengan tujuh poin. Tim asuhan Nova Arianto juga memastikan tiket langsung ke Piala Asia U-20 2027 sebagai salah satu dari delapan juara grup.

“Jangan cepat puas. Saya ingin melihat tim ini datang ke China bukan hanya untuk berpartisipasi, tetapi untuk memberikan yang terbaik dan membuat Indonesia bangga,” kata Erick. Garuda Muda lolos dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan. Indonesia mencetak lima gol dan tidak kebobolan sepanjang babak kualifikasi. Erick Thohir mengaku bangga dengan pencapaian Timnas U20 Indonesia. Namun, dia menegaskan perjalanan skuad asuhan Nova Arianto masih panjang. Menurut Erick, Piala Asia U-20 2027 akan menjadi ujian dengan level persaingan yang lebih tinggi. Karena itu, pemain diminta terus meningkatkan kemampuan sebelum tampil di putaran final. “Perjalanan masih panjang.

Saya percaya dengan potensi tim ini dan saya yakin masa depan

sepak bola Indonesia ada di tangan generasi ini,” ujar Erick.

Erick menilai kemenangan atas Australia menjadi bukti bah-



TIMNAS U-20 memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-20 tahun 2027 di China setelah mengalahkan Australia 2-0 pada pertandingan terakhir Grup H kualifikasi di Lao National Stadium KM16, Laos, Minggu (6/9).

wa Garuda Muda mulai memiliki keberanian dan kepercayaan diri saat menghadapi salah satu kekuatan sepakbola Asia.

Australia sendiri merupakan juara bertahan Piala Asia U-20. Pada edisi 2025 di China, Australia menjadi juara setelah mengalahkan Arab Saudi melalui adu penalti.

Piala Asia U20 2027 menjadi salah satu tahapan penting bagi Timnas Indonesia U-20. Turnamen tersebut juga menjadi jalur utama bagi tim-tim Asia untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-20 2027.

Piala Dunia U-20 2027 akan

Klasemen Grup H					
Indonesia	3	2	1	0	5-0
Malaysia	3	1	2	0	4-3
Australia	3	1	1	1	4-4
Laos	3	0	0	3	1-7
					0

berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim yang mencapai semifinal Piala Asia U20 2027 akan mendapatkan tiket ke turnamen dunia tersebut.

Erick meminta para pemain memanfaatkan waktu persiapan dengan maksimal. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas permainan, fisik, taktik, mental, serta kekompakan tim.

“Tiket ke Piala Asia sudah kita dapatkan, sekarang tugas kita adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi level persaingan yang lebih tinggi. Manfaatkan setiap waktu yang ada,” kata Erick.

“Terus bekerja keras, tingkatkan kualitas permainan, perkuat fisik, taktik, mental, dan chemistry sebagai sebuah tim,” lanjutnya. *(m18/ant)*

Lautaro Lega La Beneamata Bangkit

MILAN (Waspada): Kapten Lautaro Martinez *(foto)* lega Inter Milan bangkit melakukan pembalikan dramatis hingga menang 3-2 atas Napoli pada *giornata* 3 Serie A Liga Italia 2026/2027.

Dalam duel kandang di Estadio Giuseppe Meazza itu, Sabtu (Minggu WIB), La Beneamata sempat tertinggal dua bola akibat gol Matteo Politano dan Rasmus Hojlund di awal babak kedua. Nerazzurri bangkit berkat *brace* Lautaro yang mengapit gol pemain pengganti Marcus Thuram.

Yang terpenting menemukan lagi performa saya, karena tidak mudah kembali dari sebuah Piala Dunia tanpa pramusim yang cukup. Saya lega karena kami bisa melengkapi *comeback*,” klaim Lautaro melalui DAZN, Minggu (6/9).

“Kegigihan seperti ini adalah sesuatu yang kurang dari kami pada musim lalu. Di setiap musimnya, kami meningkatkan standar dan berupaya menerapkannya di atas lapangan,” beber bomber asal Argentina tersebut.

Dwigo! ke gawang I Partenopei itu membuka rekening gol Lautaro yang mandul pada dua pertandingan pertama, saat Inter mengasask Monza 4-1 dan menang tipis 1-0 di markas Cagliari. Kemenangan itu melanjutkan start sempurna I Nerazzurri dengan memenangkan tiga pertandingan pertamanya, sehingga mantap memuncaki klasemen sementara dengan AS Roma. Sebaliknya itu kekalahan kedua Napoli secara beruntun, sehingga tim asuhan Massimiliano Allegri itu terpuruk di posisi ke-12 dengan kemasn tiga poin.

Menurut Cristian Chivu, allenatore Inter asal Rumania, laga melawan Napoli begitu menghibur sekaligus menjadi promosi bagi sepakbola Italia. Terbukti La Beneamata mampu melepaskan 28 tembakan,

Giornata 3 Serie A	
Jumat, 4 September Genoa v Como	1-4
Sabtu, 5 September Fiorentina v Torino	1-2
Inter Milan v Napoli	3-2
AS Roma v Atalanta	2-1
Minggu, 6 September Frosinone v Venezia	3-2
AC Parma v Monza	1-1
Bologna v Sassuolo	-
Juventus v AC Milan	-
Senin, 7 September Cagliari v Lecce	GMT
Udinese v SS Lazio	1630
*GMT + 7 Jam = WIB	1845

sedangkan Partenopei membikin 16 percobaan.

“Itu pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan, menghibur dan menjadi promosi luar biasa bagi sepakbola Italia. Ketika kedudukan 2-2, kedua tim saling jual-beli serangan,” ucap Chivu.

“Saya melihat peluang tercipta di kedua sisi lapangan, tapi akhirnya kamilah yang merayakan kemenangan karena berhasil mengubah skor menjadi 3-2,” ujarnya lagi.

Kedua tim bermain imbang tanpa gol sepanjang babak pertama. Napoli lantas tampil mengejutkan selepas jeda dengan mencetak dua gol dalam rentang tiga menit.

Matteo Politano membuka keunggulan tim tamu menit 50. Berawal dari kesalahan Inter dalam menguasai bola di area pertahanan, Politano memanfaatkan bola rebound untuk menakluk-

kan kiper Josep Martinez.

Hanya berselang tiga menit, Napoli mengandakan keunggulan. Rasmus Hojlund memanfaatkan kemelut di kotak penalti Inter sebelum melepaskan tembakan terarah yang tak bisa dijangkau Martinez.

Inter merespons dengan cepat. Pada menit 57, Lautaro memperkecil keteringgalan menjadi 1-2. Menerima umpan tarik Federico Dimarco, dia menyelesaikan dengan sentekan dari jarak dekat.

Nerazzurri terus menekan untuk mencari gol penyama kedudukan. Usaha tim tuan rumah membuahkan hasil pada menit 82. Striker Marcus Thuram mencetak gol melalui sundulan keras setelah menerima umpan lambung Carlos Augusto.

Pada masa injury, kemelut terjadi di kotak penalti Napoli akibat sebuah umpan lambung. Bek Manuel Akanji kemudian menyodorkan bola kepada Martinez, yang langsung menyambar dengan sentekan dari depan gawang.

“Kita harus memberikan apresiasi kepada Napoli, karena mereka adalah tim yang kuat, dilatih dengan baik dan diperkuat oleh pemain-pemain yang bisa menjadi penentu kemenangan,” jelas Chivu.

“Tapi kami seharusnya bisa mengatasi gol pertama dengan lebih baik. Kebobolan gol kedua tadi adalah konsekuensi karena terlalu banyak mikir mengenai apa yang keliru dengan kebobolan gol pertama,” pungkasnya. *(m08/dazn/fi)*



Toffees Dramatis Tahan MU

LIVERPOOL (Waspada): Everton secara dramatis bangkit di menit akhir untuk menahan imbang Manchester United dengan skor 2-2 pada matchday 4 Liga Utama Inggris

Matchday 3 EPL	
Jumat, 4 September Ipswich v Liverpool	0-2
Sabtu, 5 September Newcastle v B'nemoth	2-2
Brentford v Sunderland	1-1
Brighton v Leeds United	1-1
Fulham v C Palace	2-3
Man City v Coventry	1-0
Not Forest v Tottenham	0-0
Hull City v Aston Villa	0-0
Minggu, 6 September Everton v Man United	2-2
Arsenal v Chelsea	-

2026/2027.

Bertamu di Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Minggu (6/9), Setan Merah MU menekan sejak awal. Peluang langsung didapat pada menit keenam lewat kapten Bruno Fernandes, namun upayanya digagalkan tiang gawang.

The Toffees membalas tak lama berselang melalui Tyrique George. Pemain Inggris itu sempat dijatuhkan bek Lisandro Martinez. Everton pun meminta penalti, namun tak digubris wasit. Skor tanpa gol bertahan hingga rehat.

Babak kedua baru berjalan semenit, The Red Devils berhasil unggul melalui gol winger Bryan Mbeumo. Tim tamu asuhan manajer Michael Carrick masih terus menekan, namun Toffees yang mampu menyamakan kedudukan lewat gol Tyrique George (83').

Menit 70 Carrick berusaha meningkatkan serangan Si Setan Merah dengan memasukkan Benjamin Sesko untuk menggantikan striker Matheus Cunha.

Penyerang 23 tahun itu langsung menunjukkan manfaatnya dengan memulihkan keunggulan MU menit 88. Tim tuan rumah menolak menyerah dan kembali menyamakan kedudukan dengan gol larut Ainsley Maitland-Niles (90+6').

“Berapa lama pun saya bertandang ke Everton, setiap pertandingan di situ selalu menjadi laga yang sangat sulit. Di posisi berapa pun mereka berada, secara historis selalu terasa berat,” ucap Carrick.

“David (Moyes) juga manajer yang hebat. Mereka punya pemain berbakat dan beberapa pemain menyerang yang sangat bagus,” ujarnya lagi. *(m08/espn)*

Alasan Kompany Cadangkan Kane, Olise

BERLIN (Waspada): Pelatih Vincent Kompany punya alasan tersendiri mencadangkan striker Harry Kane *(foto kanan)* dan winger Michael Olise *(foto kiri)* ketika Bayern Munich ditahan 0-0 oleh FC Schalke pada *spieltag* 2 Bundesliga Jerman. “Itu hanyalah keputusan rasional, mereka pulang sangat larut dari liburan. Saya harus mengambil keputusan untuk hari ini. Mereka masih belum dalam kondisi yang tepat untuk menjalani beban kerja penuh,” kata Kompany di halaman Die Bavarians, Minggu (6/9).

“Pertandingan Bayern Munich melawan Osnabrück sangat menguras energi mereka. Prioritasnya adalah memastikan mereka siap bermain,” klaim mantan bek sentral Timnas Belgia dan Manchester City tersebut.

Kane, Olise dan Jamal Musiala yang ikut dicadangkan, seperti halnya juga sengaja disimpan karena Bayern akan melakoni laga perdana Liga Champions 2026/2027 melawan Bodo/Glimt, Kamis mendatang.

Namun akibat hasil minor di Veltins-Arena itu, Sabtu (Minggu WIB), Die Roten melorot ke peringkat empat klasemen sementara Bundesliga dengan kooleksi empat poin.

Schalke yang baru promosi lagi, lebih dulu memberikan ancaman. Pada menit 13, Nathaniel Brown mendapat peluang setelah menerima umpan terobosan dari Aleksandar Pavlovic, tetapi tembakkannya tepat mengarah kepada kiper Loris Karius.

Tuan rumah The Royal Blues meminta penalti dalam dua kesempatan. Namun wasit tidak menganggap insiden handball Dayot Upamecano dan duel Al-



phonso Davies dengan Junior Dina Ebimbe sebagai pelanggaran yang layak dihukum penalti.

Bayern baru memiliki peluang terbaik menjelang turun minum. Luis Diaz lolos dalam situasi satu lawan satu setelah menerima umpan terobosan Brown, tapi gagal memaksimalkan peluang ini.

Kane, Olise dan Musiala kemudian dimasukkan sejak awal babak kedua. Kehadiran ketiganya membuat permainan meningkat dan Die Roten lebih agresif dalam menyerang.

Diaz kembali mendapatkan peluang tak lama setelah jeda. Menerima umpan Davies, Diaz mencoba melakukan chip terhadap Karius. Namun, bola mengenai tangan sang kiper sebelum dibuang oleh Hasan Kurucay.

Olise yang baru masuk juga langsung mengancam gawang Schalke, tapi Karius melakukan penyelamatan dari jarak dekat.

Konrad Laimer turut membuat peluang emas ketika berhadapan satu lawan satu dengan Karius, tapi tembakkannya hanya mengenai sisi jaring gawang.

Bayern terus menekan hingga menit-menit akhir. Kane hampir menjadi pahlawan setelah melepaskan tembakan keras dari jarak sekitar 23 meter yang mengarah

Hasil Spieltag 2	
Stuttgart v FC Koeln	4-1
Leverkusen v Union Berlin	4-0
Gladbach v Elversberg	3-4
Paderborn v Freiburg	0-1
Hoffenheim v Dortmund	2-3
Werder Bremen v Leipzig	3-1
Schalke v Bayern Munich	0-0
Hamburg SV v Mainz	-
E Frankfurt v Augsburg	-

ke pojok kiri atas gawang.

Namun Karius melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis bola keluar lapangan. Schalke pun berhasil mengamankan satu poin berharga, setelah kembali ke Bundesliga menyusul absen tiga musim.

“Ketika Anda bermain melawan tim yang kompak dan agresif serta melakukan banyak hal dengan baik, Anda harus mencetak gol dari momen-momen tersebut. Dari sisi peluang, kami sebenarnya bisa memenangkan pertandingan ini,” klaim Kompany.

“Tetapi itulah sepakbola, para pemain telah berjuang keras. Saya pernah melihat dan mengalami pertandingan seperti ini, ketika kami memiliki momen-momen bagus dan peluang besar,” katanya menambahkan. *(m08/dpa/espn)*



BUPATI Sergai Darma Wijaya, Plt. Sekretaris PSSI Sumut Yosephine Sembiring, Plt Ketua PSSI Sergai Elianta Sembiring pose bersama tim Sejati Jaya (Sergai) dan TGM usai pembukaan Piala Soeratin U-17 Sumut di Sergai, Sabtu (5/9).

Bupati Senang Sergai Tuan Rumah

Piala Soeratin U-17 Sumut

PEGAJAHAN (Waspada): Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya membuka kompetisi sepakbola remaja Piala Soeratin U-17 Tingkat Provinsi Sumatera Utara di Lapangn PT. Pajar Agung di Desa Bengabeng, Kec. Pegajahan, Kab. Sergai, Sabtu (5/9).

Pembukaan kompetisi ditandai tendangan pertama (kick-off) oleh Bupati Sergai, Darma Wijaya didampingi Plt. Sekretaris PSSI Sumut, Yosephine Sembiring, sebelum pertandingan antara Sejati Jaya melawan TGM dimulai.

Dalam sambutannya, Bupati Sergai Darma Wijaya mengaku senang sekaligus mengapresiasi kepercayaan yang diberikan PSSI kepada Kabupaten Sergai untuk menjadi salah satu tuan rumah

penyelenggaraan kompetisi kelompok umur tersebut.

Menurut Bupati, Sergai merupakan daerah yang konsisten melahirkan talenta pesepakbola berbakat, salah satunya Arkhan Fikri yang kini menembus level nasional.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyambut baik penunjukan ini. Sergai ini salah satu kabupaten penyumbang pemain sepakbola. Kami yakin dan percaya anak-anak yang bertanding hari ini memiliki kemauan keras untuk maju,” ujar Darma Wijaya.

Darma juga mengatakan bahwa semangat anak-anak Sergai dalam bermain sepakbola tetap tinggi meskipun fasilitas belum

sepenuhnya memadai. Ia berharap PSSI ke depan dapat memberikan perhatian, termasuk dukungan anggaran pembangunan stadion di Sergai.

Sebelumnya, Plt. Sekretaris PSSI Sumut, Yosephine Sembiring, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sergai atas kesiapannya memfasilitasi gelaran ini. Ia mengungkapkan bahwa penunjukan Sergai sebagai tuan rumah merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Soeratin U-17 Sumut.

“Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Serdang Bedagai menjadi tuan rumah. Biasanya untuk kelompok umur U-17 selalu dipusatkan di Medan,” kata Yosephine mewakili Plt.

Ketua PSSI Sumut, Arya Mahendra Sinulingga.

Yosephine menjelaskan, sebanyak 14 tim bersaing pada gelaran tahun ini yang dibagi dalam tiga zona pertandingan, yakni Zona Langkat, Serdang Bedagai dan Kota Medan.

Dia menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas, fair play serta kepemimpinan wasit yang jujur agar melahirkan calon pemain profesional berkualitas.

Hadir dalam acara pembukaan Kadis Poraparbud Sergai Achyar, Manajer PT Fajar Agung Suta Wijaya, Camat Pegajahan Sukma Permana, Plt Ketua Askab PSSI Sergai Elianta Sembiring, Pj Kepala Desa Bengabeng Sunawar serta undangan lainnya. *(a15/B)*

PSSA Asahan, Brimo Langkat Menang Mudah

TANJUNGPURA (Waspada): Kompetisi Sepakbola Remaja

Soeratin Cup U-17 Zona Sumut Grup C bergulir di Stadion Nur-



TIM Brimo Langkat U-17 pose sebelum bertanding di Stadion Nurcahaya Tanjungpura, Minggu (6/9).

cahaya Tanjungpura, Kab. Langkat, mulai Minggu (6/9).

Grup C dihuni empat tim terdiri atas Brimo Langkat sebagai tuan rumah, kemudian PSSA Asahan, Satria Muda Sergai dan Victory Daiiri. Keempat tim mulai menjalani pertandingan perdana pada Minggu.

Plt Ketua Askab PSSI Langkat, Muhammad Syafri, mengaku bangga Langkat bisa menjadi tuan rumah Soeratin Cup Zona Sumut di kategori U-13, U-15 dan U-17.

“Ini merupakan sejarah, Soeratin Cup Zona Sumut pada tiga kategori, Kabupaten Langkat menjadi tuan rumahnya,” sebut Syafri.

Sementara itu, PSSA Asahan U-17 berhasil menang meyakinkan pada pertandingan perdana dengan menaklukkan Victory Daiiri 5-1 di Stadion Nurcahaya Tanjungpura.

Gol PSSA Asahan dihasilkan Al Hasbi, M Ridho (2 gol), M Riziq dan Andhika. Sedangkan gol semata wayang Victory Daiiri dicetak Absalom.

Kemudian pada pertandingan kedua, Brimo Langkat menaklukkan Satria Muda Sergei dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Keempat gol Brimo Langkat dihasilkan Deni Setiawan, Kindy irhamna, Nasri Rafael dan Gilang Ramadhan. *(c01)*



2.000 Nelayan Terancam Pengerukan Alur Belawan

HNSI Minta Survei Bersama



Ketua DPC HNSI Kota Medan Rahman Gafiqi SH didampingi para nelayan Ambai memberikan keterangan kepada Waspada di lokasi proyek pengorekan kolam dan alur pelayaran di Pelabuhan Belawan, Sabtu (5/9).

BELAWAN (Waspada): Pengurus DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan meminta PT Pelindo Regional I Belawan mengajak para nelayan melakukan survei pengerukan alur dan dumping hasil pengerukan sebelum dilaksanakannya proyek pengerukan area kolam pelabuhan dan alur pelayaran serta dumping material hasil pengerukan.

“Menindaklanjuti hasil konsolidasi dengan para nelayan sebelumnya, masyarakat nelayan yang terdampak langsung terhadap proses kegiatan pengerukan Area Kolam dan damping hasil pengerukan, maka DPC HNSI Medan meminta sebelum proses kegiatan berlangsung, dilakukan survei bersama para nelayan yang akan terdampak akibat pelaksanaan kegiatan tersebut,” sebut Ketua DPC HNSI Kota Medan Rahman Gafiqi SH kepada Waspada, Sabtu (5/9) di lokasi alur pelayaran Pelabuhan Belawan.

Dijelaskan Rahman, DPC HNSI Kota Medan adalah organisasi yang menaungi, mengayomi nelayan di pesisir Medan Utara baik itu nelayan kecil maupun nelayan tradisional hingga buruh nelayan, hingga Minggu (6/9) ma-

sih menunggu pemberitahuan survei sesuai penyampai tim teknis dalam kegiatan sosialisasi pengembangan dan pengoperasian kawasan Pelabuhan Belawan yang diadakan, Kamis (13/8) di Aula Kantor Camat Medan Belawan yang dihadiri oleh Muspika, tokoh masyarakat, serta nelayan.

“Sebagaimana disampaikan oleh tim teknis, bahwa pengerukan alur kapal sepanjang 12 Mil dari lokasi pelabuhan dan lokasi dumping hasil pengerukan seluas 400 Ha di tengah laut tepatnya 14 mil dari bibir pantai yang daerah tersebut selama ini menjadi lokasi para nelayan melakukan penangkapan ikan serta hasil laut lainnya,” terang Rahman.

Apabila proses pembangunan tersebut terlaksana, tambah

Rahman, maka ribuan nelayan tradisional, nelayan kecil akan terdampak langsung dari pelaksanaan pembangunan tersebut yang bisa menimbulkan konflik terhadap kelangsungan hidup bagi para nelayan yang mencari nafkah di laut.

“Lokasi pelaksanaan pengerukan dan dumping adalah lokasi nelayan melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap pasif dan aktif serta nelayan yang menggunakan alat tangkap Ambai adalah yang paling menderita jika proyek pengerukan kolam dan alur pelayaran dilaksanakan,” tutur Rahman.

Dijelaskan Rahman, nelayan Ambai dan nelayan pasif dan aktif merupakan nelayan yang bermukim di Kelurahan Terjun, Kelurahan Labuhan Deli, Labuhan Pekan, Nelayan Indah, Belawan Bahari, Belawan Bahagia, Belawan I dan Bagan Deli.

Rahman juga menjelaskan, di sekitar lokasi pengerukan alur tersebut ada alat tangkap Pasif (alat tangkap dan tetap pada posisi tidak bisa bergerak) yang sering

disebut Alat Tangkap Jaring Ambai atau alat tangkap berkantong yang tidak bisa bergerak yang hanya menunggu air pasang. Selama pelaksanaan proses pengerukan maka alat tangkap pasif ini tidak bisa digunakan untuk mencari nafkah oleh para nelayan.

“Berangkat dari hal tersebut, DPC HNSI Kota Medan telah melakukan pendataan hampir 2.000 lebih nelayan akan terdampak, baik itu nelayan Pasif dan nelayan aktif. DPC HNSI juga berharap agar dalam hal pelaksanaan pembangunan jangan sampai merugikan nelayan sebagaimana amanat UU No 31 tahun 2004 jo UU Nomor 45 2009 tentang Perlindungan Nelayan yang mana Nelayan adalah Pahlawan Gizi dan Nelayan Kecil harus dibina dan disejahterakan,” ujar Rahman.

Oleh sebab itu, tambah Rahman, DPC HNSI Kota Medan telah mengirim surat yang ditujukan kepada Executive Direktur PT. Pelabuhan Indonesia Regional I Belawan dan PT. Mitra Hijau Indonesia. Dalam surat tersebut, tambah Rahman, DPC HNSI Kota Medan meminta kepada pihak terkait agar mengajak para nelayan ikut melakukan survey ke lokasi pengerukan alur.

Sementara itu, Zulkifli, 40, nelayan Ambai berharap agar pihak PT Perum Pelabuhan Indonesia memperhatikan nasib para nelayan yang terdampak dari proyek pengerukan kolam dan alur pelayaran. “Selama ini nasib kami ditentukan hasil dari tangkapan Ambai. Jika proyek terlaksana, kami tidak bisa mencari nafkah dan membiayai kehidupan keluarga. Jadi, kami para nelayan Ambai sangat mengharapkan perhatian serius dari PT Pelindo Regional I demi kelangsungan hidup para nelayan,” tutup Zulkifli. (m25)



Wagubsu H Surya memukul gong di acara pengukuhan kepengurusan ICMI Muda Sumut di Medan, Sabtu (5/9).

ICMI Muda Sumut Kekuatan Intelektual Baru

MEDAN (Waspada): Kehadiran Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi kekuatan intelektual baru yang aktif menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan di daerah. Harapan itu mengemuka dalam pengukuhan kepengurusan ICMI Muda Sumut di Medan, Sabtu (5/9).

Pengukuhan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Surya jajaran pengurus ICMI, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan serta sejumlah elemen masyarakat. Ketua Umum MPW ICMI Muda Sumut, Ilham Suheri Situmorang, mengatakan cendekiawan muda harus mampu membawa ilmu pengetahuan keluar dari ruang akademik dan diwujudkan dalam bentuk gagasan serta karya yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“ICMI Muda Sumatera Utara harus menjadi rumah bagi gagasan dan gerakan. Kita ingin cendekiawan muda tidak hanya berbicara, tetapi hadir mencari solusi, melakukan penelitian, membangun pengabdian dan melahirkan karya yang dirasakan masyarakat,” ujar Ilham.

Menurutnya, berbagai persoalan seperti pendidikan, kemiskinan, narkoba, lingkungan, ekonomi masyarakat hingga transformasi digital membutuhkan keterlibatan generasi muda terdidik. Karena itu, ICMI Muda Sumut akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat.

Wakil Gubernur Sumut menekankan agar organisasi cendekiawan muda tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, kekuatan intelektual generasi muda harus diarahkan untuk

menghasilkan karya dan solusi yang mendukung pembangunan Sumatera Utara.

Sementara itu, Ketua Umum Presidium MPP ICMI Muda, Dr. Tumpal Panggabean, mengatakan kecendekiain tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kemampuan akademik. Cendekiawan harus berani masuk ke tengah persoalan masyarakat dan mengambil peran dalam menyelesaikannya. “Pengetahuan harus dikonversi menjadi gagasan, gagasan menjadi gerakan, dan gerakan melahirkan perubahan. Di situlah pengabdian seorang cendekiawan,” katanya.

Rangkaian pengukuhan juga dirangkai dengan Dialog Cendekia yang menghadirkan Dekan FISIP USU Dr. Harta Ridho, S.Sos., M.Sp., Dekan FIS Unimed Dr. Ratih Baiduri, S.Si., M.Si., serta Dekan Fakultas Sainstek UINSU Dr. Zulham, S.H., M.Hum. Dalam dialog tersebut, para akademisi menekankan pentingnya penelitian dan pengabdian sebagai bentuk nyata kontribusi kaum intelektual. Ilmu pengetahuan dinilai harus mampu menjembatani kebutuhan kampus dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ke depan, ICMI Muda Sumut diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi lintas disiplin untuk melahirkan riset, rekomendasi kebijakan, inovasi sosial dan program pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pengurus baru juga didorong membangun jaringan yang lebih luas dengan berbagai pihak agar gagasan yang lahir tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dapat diimplementasikan menjadi program yang terukur dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan Sumatera Utara. (m34)

BKOW Sumut Sosialisasi Stunting Kepada Remaja



Ketua Umum BKOW Sumut, Hj. Fahrizar Iskandar Hasibuan bersama pengurus dan kepala sekolah serta peserta kegiatan.

MEDAN (Waspada): Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Utara menggelar sosialisasi pencegahan stunting pada remaja, Jumat (4/9) di SMK Negeri 1 Pancur Batu.

BKOW berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

(P3AKB) Sumut.

Hadir, Ketua Umum BKOW Sumut, Hj. Fahrizar Iskandar Hasibuan beserta jajaran pengurus, Kepala SMK Negeri 1 Pancur Batu, Dra Yasmumi MSI para pelajar dan guru di SMK Negeri 1 Pancur Batu.

Hadir pula Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berenc-

ana (P3AKB) Sumut, Dwi Endah Purwati, diwakili Erni Hafsari Nasution S.Sos, MAP, Hery Valona Bonatua Ambarita, SKM, M.Pd, M.Kes selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumut.

Ketua Umum BKOW Sumut, Hj. Fahrizar Iskandar Hasibuan mengatakan, sosialisasi pencegahan stunting bagi siswa di SMK

Negeri 1 Pancur Batu dan persiapan generasi emas melalui kesehatan remaja, menjadi kegiatan yang penting. Memberi wawasan pada pelajar terkait stunting.

“Mengapa perlu edukasi ini diberikan kepada remaja, supaya mereka punya pengetahuan tentang apa itu stunting, karena mereka calon orang tua dimasa depan. Agar tercipta generasi sehat bebas stunting dan persiapan generasi emas melalui gizi dan kesehatan remaja,” ujarnya.

Dia juga berharap para remaja bisa menyikapi dan berkontribusi untuk pencegahan stunting, sehingga berguna saat mereka menjadi orang tua bagi anak anaknya.

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut diwakili Erni Hafsari Nasution, memberi apresiasi atas kegiatan ini, berharap memberi kontribusi positif pada generasi muda. (m22)

Pelayanan Kesehatan Tak Boleh Diskriminatif

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syaiful Ramadhan, melaksanakan Sosialisasi Produk Hukum Daerah ke-IX Tahun Anggaran 2026, dengan mengangkat Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di sejumlah titik di Kota Medan, yakni Jl. B. Katamsong Gang Melur Medan Maimun, Jl. Ringroad Pasar I Gang Beo, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dan Medan Johor, Sabtu-Minggu (5-6/9).

Syaiful Ramadhan menekankan pentingnya pelaksanaan pelayanan kesehatan yang baik, mudah dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat Kota Medan. Menurutnya, jangan sampai ada warga Medan yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi justru tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. “Pelayanan kesehatan harus dilaksanakan dengan baik. Jangan ada warga yang tidak terlayani,” tegas Syaiful.

Syaiful mengingatkan pihak rumah sakit agar tidak lagi mem-



Anggota DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan saat Sosperda No. 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, di Jl. Mustafa 3, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Medan Johor, Sabtu-Minggu (5-6/9).

persulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya dengan permasalahan status kepesertaan maupun tunggakan BPJS Kesehatan. “Medan yang saat ini sudah memiliki program UHC, rumah sakit jangan lagi mem-

permasalahan BPJS, termasuk tunggakan BPJS. Warga Medan punya hak mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya. Politik PKS tersebut menjelaskan, UHC merupakan salah satu bentuk terobosan Pemerintah Kota Medan dalam memberikan kemu-

dahan akses kesehatan kepada masyarakat. Di sisi lain, ia juga mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan mengedepankan kepentingan masyarakat. (m31)

Aktivitas Gunung Sinabung Masih Fluktuatif

MEDAN (Waspada): Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo hingga Sabtu (5/9) masih berfluktuatif. Meski belum terjadi peningkatan status, gunung api tersebut tetap berada pada Status Siaga (Level III).

Ketua Pos Pengamatan Gunung Sinabung, Armen Purbu, mengatakan kolom asap masih teramat membumbung tinggi dari kawah dengan warna putih, menandakan aktivitas vulkanik masih berlangsung.

“Masih siaga. Aktivitasnya masih fluktuatif, dan asapnya masih tinggi berwarna putih,” ujar Armen Purbu, Sabtu (5/9) saat diminta keterangannya.

Ia mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi rekomen-

dasi PVMBG dengan tidak memasuki kawasan berbahaya dalam radius yang telah ditetapkan. Warga juga diminta tetap tenang namun waspada terhadap potensi perubahan aktivitas Gunung Sinabung. (m32)



Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto, menyerahkan bantuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada para pengungsi di Kabupaten Karo, pekan lalu.

Megawati Bantu Pengungsi Gunung Sinabung

MEDAN (Waspada): Kepedulian terhadap warga terdampak erupsi Gunung Sinabung diwujudkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melalui bantuan kebutuhan dasar bagi pengungsi di Kabupaten Karo.

Bantuan tersebut disalurkan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, saat mengunjungi Posko Pengungsian dan Posko Kesehatan Jambur, Desa Suka Tepu, Kecamatan Namanteran, Jumat (4/9).

Dalam penyaluran itu, Rapidin didampingi Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto, Bendahara DPD Meriahta Sitepu, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan serta sejumlah pengurus partai.

Bantuan tahap pertama terdiri dari 100 matras, 500 selimut, 1.000 masker, 150 zak beras, 500 sabun mandi dan 500 pasta gigi. Bantuan tersebut disiapkan berdasarkan kebutuhan warga yang disampaikan melalui kepala desa.

“Ini bantuan tahap pertama dan akan dilanjut-

kan besok sampai kebutuhan pengungsi terpenuhi semua. Bahan yang kita bawa merupakan permintaan dari kepala desa yang berkomunikasi langsung dengan PDI Perjuangan,” ujar Rapidin.

Menurut Rapidin, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Megawati setelah melihat pemberitaan mengenai erupsi Sinabung. Megawati kemudian meminta jajaran PDI Perjuangan Sumut turun langsung membantu warga terdampak.

Rapidin mengatakan perhatian Megawati terhadap masyarakat Karo juga memiliki kedekatan historis. Megawati diketahui menyandang marga Perangin-angin dan memiliki hubungan sejarah dengan masyarakat Karo.

“Setelah melihat pemberitaan mengenai bencana di Tanah Karo, Ibu Megawati meminta DPD PDI Perjuangan Sumut segera turun ke lokasi untuk membantu pengungsi,” katanya.

Rapidin memastikan bantuan akan terus dilanjutkan sesuai kebutuhan warga selama berada di pengungsian. (m34)

Peternakan Rakyat Solusi Kendalikan Inflasi Sumut

MEDAN (Waspada): Pengembangan peternakan ayam berbasis kelompok masyarakat dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi di Sumatera Utara.

Karenanya, anggota DPRD Sumut, Aripay Tambunan, mendorong Pemerintah Provinsi Sumut memperkuat produksi ayam petelur dan ayam potong dengan memberdayakan kelompok masyarakat sebagai pelaku usaha.

“Jangan gara-gara harga ayam naik kemudian inflasi terganggu. Kita harus berpikir bagaimana produksi ayam ini bisa ditingkatkan di Sumut,” ujar Aripay di Medan, pekan lalu. Menurut politisi Partai Gerindra ini, ayam, telur dan sejumlah komoditas pangan lainnya seperti cabai memiliki harga yang mudah berfluktuasi. Karena itu, pemerintah harus memperkuat produksi dari hulu agar ketertangungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.

Aripay meminta Dinas Pertanian Sumut menjadikan pengembangan peternakan ayam sebagai program prioritas. Bantuan, katanya, dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat melalui pembangunan kandang sederhana, penyediaan bibit, pakan, pendampingan teknis hingga akses pemasaran.

Ia menilai pengembangan peternakan tidak

harus dimulai dengan modal besar. Satu kandang sederhana diperkirakan dapat dibangun dengan anggaran sekitar Rp1,7 juta hingga Rp2 juta dan menampung puluhan ekor ayam.

“Kalau kelompok-kelompok peternak ini kita dorong, terutama di daerah yang cocok untuk ayam petelur dan ayam potong, mereka bukan hanya menerima bantuan. Mereka menjadi bagian dari solusi pangan Sumatera Utara,” katanya.

Lapangan Kerja
Selain menjaga pasokan dan stabilitas harga, pengembangan peternakan rakyat juga dinilai mampu meningkatkan pendapatan keluarga serta membuka lapangan kerja.

“Jadi manfaatnya ganda. Kita menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan harga, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Aripay berharap dukungan pemerintah dan lembaga terkait dapat diarahkan untuk memperkuat kelompok peternak sehingga program tersebut tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi berkembang menjadi usaha produktif dan berkelanjutan.

“Melawan inflasi bukan hanya soal menahan harga tetap rendah, tetapi memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan yang mereka konsumsi sendiri,” pungkas Aripay. (m34)

Kasus Eks Istri Polisi Viral

Tokoh Agama Desak Polri Ungkap Tuntas

MEDAN (Waspada): Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat Sumatera Utara (Sumut), mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengungkap tuntas kasus viral di media sosial (Medsos) dan pemberitaan media massa, yang menyeret nama mantan istri anggota Polri dan dikaitkan dengan seorang perwira tinggi yang pernah menjabat Wakil Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumut.

Sebab, informasi yang beredar menyebut W, 30, mantan istri Brigadir IH, pernah "dijual" suaminya kepada Wakapolda pada 2021, telah menimbulkan keresahan sekaligus berpotensi mencoreng nama baik institusi Polri.

Para tokoh agama dan masyarakat tersebut, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Dr Hasan Matsum, M Ag; Tokoh Masyarakat Sumut, Prof Mohd Hatta; Pimpinan Pondok Pesantren Jabal Noor, KH. Zulfikar Hajar, Lc, Pendiri dan pembina Pondok Pesantren Tasawuf; Buya Prof. Dr. KH. Amiruddin MS, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut, Drs. H. Muhammad Hatta Siregar, SH, MSI dan Ketua Gerakan Muda (Gema) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Sumatera Utara adalah Masdar Tambusai, S.Ag, saat memberi pernyataannya kepada Waspada di Medan, Sabtu (5/9).

Disebutkan Prof Hatta, pihaknya merasa prihatin dan resah karena apa yang diviralkan, baik di media sosial (Medsos) dan pemberitaan di media massa ini menyentuh keberadaan pemerintah khususnya Polri. "Oleh sebab itu kami berkumpul mengutarakan rasa keprihatinan kami terhadap hal yang berkenaan dengan marwah Polri dengan menyinggung salah seorang perwira

tinggi yg pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumut," ucap Prof Hatta.

Sebenarnya, lanjut Prof Hatta, masyarakat dan terutama para tokoh agama ini sangat membanggakan Poldasu, apalagi ketika mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden pada Hari Bhayangkara ke-80, 1 Juli 2026 kemarin. "Tapi dengan beredarnya informasi tersebut kita khawatir bisa menjatuhkan marwah dan wibawa institusi Polri. Untuk itu Kapolri, dapat dengan segera mengungkapkan kasus yang sebenarnya sehingga nama baik pemerintah dan Polri tidak tercemar ditengah-tengah masyarakat," tutur Prof Hatta.

Sementara Hasan Matsum menambahkan bahwa inti keprihatinan yang menjadi perhatian terhadap informasi viral tersebut adalah karena menyinggung marwah pemerintah dan Polda Sumut.

"Informasi yang viral ini kita khawatirkan dapat mencederai kewibaan Polri. Untuk itu harapan kita Kapolri dapat mengungkapkan kejadian sebenarnya dan memulihkan nama baik Polri dan perwira Polri yang pernah menjabat sebagai Wakapolda," ucapnya. Hasan Matsum juga berharap masyarakat yang membaca informasi viral ini tidak membangun opini sendiri dan menyerahkan seluruhnya pada Kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan dan menyelesaikan secara profesional. "Kepolisian juga harus segera mengumumkan kepada masyarakat hasil penyelidikan itu sehingga tidak berkambang opini yang simpang siur dan dapat mengganggu ketentraman di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

KH Zulfikar Hajar, menegaskan, keterlibatan para tokoh ulama ini sesuai

dengan ajaran Rasulullah SAW, yaitu "Ada dua golongan manusia, jika keduanya baik, maka baiklah seluruh manusia. Dan jika keduanya rusak, maka rusaklah seluruh manusia. Mereka adalah para ulama dan para umara". "Menyikapi persoalan ini, maka ulama dan umara bersama umat harus bersinergi. Kalau tidak, hanya sebelah pihak ini tidak aman nanti. Runtuh negara ini," tegasnya.

Diketahui informasi sebelumnya, kasus kematian W kembali menjadi sorotan. Keluarga mengungkapkan bahwa korban semasa hidupnya diduga dijual suaminya kepada seseorang yang menjabat sebagai Wakapolda. Pernyataan keluarga yang mengejutkan itu diketahui berdasarkan video yang telah beredar viral di berbagai platform media sosial. "Hancurnya si Loren ini sejak si Iman menjualnya kepada atasannya kalau tidak salah jabatannya dulu Wakapolda itu dulu di Tahun 2020-2021," ujar seorang wanita dari keluarga W dalam rekaman video di media sosial yang dilihat awak media, Kamis (3/8). Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyatakan, bahwa Bid Propam Polda Sumut tengah melakukan pendalaman serta penyelidikan. "Mengenai pernyataan yang beredar di medsos itu Bid Propam sedang mendalaminya," terangnya bahwa nantinya Propam akan memeriksa suami dari W yang merupakan personel Polsek Medan Sunggal. "Terhadap Brigadir IH akan diminta keterangan.

Ferry menerangkan, W ditemukan meninggal dunia setelah bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya pada beberapa waktu lalu. "Namun begitu Polda Sumut telah membentuk Tim Supervisi melakukan asistensi untuk memastikan kematian korban tersebut," terangnya. (m31)



Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha didampingi Kanit 1, AKP Ruspian menginterogasi bandar ganja Medan Tembung.

Bukan Layani Warga, Oknum Kepling Wanita Malah Jual Ekstasi, Pod Getar

MEDAN (Waspada): Tak hanya melayani warganya, oknum Kepala Lingkungan di Kota Medan juga melayani masyarakat yang membeli Narkoba. Tak pelak lagi, wanita berinisial FAP ,41, warga Jl. Brigien Katamso Gang Pantai Burung, Kecamatan Medan Maimun, Sabtu (5/9) dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan.

Oknum Kepling ditangkap saat hendak transaksi Narkoba jenis pil ekstasi dan Pod Getar berisi cairan narkotika di sebuah minimarket yang letaknya tidak jauh dari rumahnya.

Saat ditangkap, petugas menyita dua vape narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan pod getar merk El Chapo dan dua butir pil ekstasi. "Pelaku berprofesi sebagai Kepling di kota Medan, untuk barang bukti ada dua pod getar dan dua butir pil ekstasi," ungkap Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Sabtu (5/9).

Pelaku, diketahui baru dalam kurun waktu dua bulan terakhir mengedarkan narkoba. Biasanya, pelaku selalu menggunakan minimarket sebagai tempat transaksi, namun beberapa kali transaksi juga dilakukan di pinggir jalan.

"Pelaku mengedarkan narkoba tidak hanya di lingkungan tempat ia tinggal dan bertugas

sebagai Kepling, namun juga ke masyarakat di luar lingkungan tempat tinggalnya. Untuk setiap satu pod getar yang terjual, pelaku mendapat keuntungan Rp200 ribu, sedangkan untuk satu butir pil ekstasi yang laku terjual pelaku mendapat keuntungan Rp30 ribu," tambah Rafli.

Dalam kasus ini, Polisi kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku, yang identitasnya sudah diketahui. Polisi memastikan, tidak akan pandang bulu dalam setiap penegakan hukum dalam hal pemberantasan narkoba.

"Pemasok narkoba kepada pelaku berinisial M, ini yang sedang kami kejar. Kami pastikan pengedar maupun bandar bisa berlari, tapi tidak akan bisa bisa



Oknum Kepling wanita tersangka kasus narkoba.

bersembunyi dari kami," pungkas Rafli. (m25)

Usut Tuntas Sengketa Lahan Di Tadukan Raga

MEDAN (Waspada): Ahli waris almarhum M. Nasir Matondang meminta Pemerintah Kabupaten Deliserdang mengusut dan menelusuri secara menyeluruh riwayat sengketa lahan seluas sekitar 5 hektare di Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir.

Perwakilan ahli waris, Hozali Matondang, mengatakan pihak keluarga memiliki sejumlah dokumen yang berkaitan dengan riwayat penguasaan dan penggarapan lahan tersebut. "Kami meminta persoalan ini ditelusuri secara terbuka dan objektif berda-

sarkan dokumen yang ada," ujar Hozali di Medan, Sabtu (5/9).

Menurutnya, keluarga memiliki Surat Izin Menggarap Tanah Nomor 4772 atas nama M. Nasir Matondang yang diterbitkan Panitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja Deli Serdang pada 10 September 1965. Namun, ahli waris mengaku menemukan sejumlah dokumen perantaraan lain yang disebut berkaitan dengan objek lahan tersebut, di antaranya dokumen yang terbit pada 2001 atas nama Arfan Batubara dan pada 2018 atas

nama Yusraini.

"Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Kami hanya meminta seluruh dokumen dan proses administrasi yang berkaitan dengan tanah ini diperiksa secara objektif," tegasnya.

Hozali menilai penelusuran riwayat lahan secara menyeluruh sangat penting untuk menghindari munculnya persoalan baru di kemudian hari. Karena itu, pihaknya berharap seluruh pihak terkait dapat membuka data dan dokumen yang berkaitan dengan objek tanah tersebut.

Tiga Kepling Medan Tersandung Narkoba

DPRD Desak Syarat Bebas Narkoba Diperketat

MEDAN (Waspada): Munculnya sejumlah kasus oknum Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan yang ditangkap aparat kepolisian, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba menjadi perhatian serius DPRD Kota Medan.

Sepanjang 2026, setidaknya tiga oknum Kepling di Kota Medan tercatat ditangkap aparat kepolisian dalam kasus narkoba. Bahkan, para oknum tersebut diduga tidak sekadar sebagai pengguna, tetapi ada yang diduga berperan dalam jaringan peredaran narkoba.

Tiga kasus tersebut masing-masing melibatkan MF Kepling di Medan Barat yang ditangkap Polrestabes Medan pada Maret 2026 di Kelurahan Pulau Brayan Kota. Kemudian AR Kepling di Medan Polonia yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada 15 Agustus 2026 di

Jalan Starban.

Terbaru, FAP seorang Kepling wanita di Kecamatan Medan Maimun, ditangkap Satresnarkoba Polrestabes Medan pada akhir Agustus 2026 di kawasan Jalan Brigien Katamso. Rentetan kasus tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan pengangkatan Kepling.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, mendesak Pemko Medan mendesak segera dilakukan revisi terhadap Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

Menurut Syaiful, salah satu poin penting yang harus dimasukkan dalam revisi Perda terse-

but adalah persyaratan calon Kepling wajib bebas dari narkoba yang dibuktikan melalui tes narkoba sebelum proses pengangkatan. "Kita mendesak Pemkot supaya merevisi Perda Kepling, terutama mencantumkan poin menjadi Kepling harus bebas narkoba," ujar Syaiful Ramadhan di Medan, Minggu (6/9).

Ia menjelaskan, persyaratan bebas narkoba tersebut belum secara tegas tercantum dalam Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017. Padahal, posisi Kepling sangat strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan menjadi salah satu unsur pemerintahan yang berada paling dekat dengan warga.

Syaiful yang juga merupakan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan menilai, seorang Kepling semestinya mam-

pu menjadi pengayom sekaligus teladan bagi masyarakat, bukan justru terseret dalam praktik penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. "Ini kasus serius. Ada Kepling yang kedapatan memiliki ribual pil ekstasi dan narkoba jenis baru, ini tentu mencoreng marwah Kota Medan," tegasnya.

Karena itu, menurut Syaiful, persyaratan bebas narkoba harus menjadi syarat wajib dan tidak boleh sekadar formalitas dalam setiap proses rekrutmen maupun pengangkatan Kepling.

Ia mendorong agar setiap calon Kepling menjalani pemeriksaan atau tes narkoba yang dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. "Selain narkoba, masalah Kepling yang lain juga masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, seperti pengangkatan dan periodisasi," pungkasnya. (m31)

Polisi Tangkap Bandar Ganja Medan Tembung

MEDAN (Waspada): Meski sudah beberapa kali menjalani hukuman penjara namun tak membuat pria berinisial MA ,21, bertobat. Usai menjalani hukuman, MA malah menjadi pengedar narkotika jenis daun ganja kering.

Akibat perbuatannya, Sabtu (5/9) MA dijabloskan kembali ke dalam sel karena diringkus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan usai menjual daun ganja kering di rumahnya Jl. Pukat I, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung.

Dari tersangka MA, polisi menyita 141 paket daun ganja kering siap pakai sebagai barang bukti. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebutkan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima petugas mengenai aktivitas MA yang diduga terlibat dalam peredaran ganja di kawasan Medan Tembung.

Berebekal informasi tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian selama beberapa hari. Hingga akhirnya, petugas bergerak dan meringkus MA ketika diduga hendak menjalankan aktivitas peredaran narkotika.

"Dari tangan pelaku, petugas menyita 141 paket daun ganja kering beragam ukuran, mulai dari yang siap edar hingga ukuran besar yang siap dipasok ke pengedar lain," ungkap AKBP Rafli, Minggu (6/9) pagi.

Ironisnya, MA ternyata bukan orang baru da-

lam perkara kriminal. Pada 2023, ia pernah menjalani hukuman penjara akibat kasus pencurian dan baru menghirup udara bebas pada 2025. Setelah bebas, MA sempat mencoba menjalani kehidupan normal dengan bekerja di sebuah pasar malam.

Namun, setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), MA justru memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang. Sekitar dua bulan terakhir, MA diduga mulai menjalankan bisnis haram sebagai bandar sekaligus pengedar ganja. "Pelaku ini residivis kasus pencurian, menjalankan bisnis haram ini sejak dua bulan lalu usai di-PHK dari pekerjaannya," terang AKBP Rafli didampingi Kanit 1, AKP Ruspian SH MH.

Menurut Rafli, MA menyasar wilayah Medan Tembung dan kawasan Tembung, Kabupaten Deli-serdang. Perputaran barang haram tersebut terbilang cukup cepat.

Dalam sepekan, MA disebut mampu menjual lebih dari 100 paket ganja. Polisi kini tidak hanya membidik MA. Penyidik juga tengah memburu pemasok yang diduga berada di atas pelaku dalam jaringan tersebut. Identitas pemasok disebut telah dikantongi petugas.

"Pelaku kami pastikan bandar sekaligus pengedar untuk kawasan Medan Tembung. Saat ini kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku yang identitasnya sudah dikantongi," tegas Rafli. (m25)

Korupsi Smartboard Langkat Mantan Kadisdik Dan PPK Dituntut 11 Tahun Penjara

MEDAN (Waspada): Eks Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kab Langkat, Saiful Abdi dan Supriyadi selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dituntut jaksa masing-masing 11 tahun penjara.

Keduanya bersama terdakwa Budi Pranoto Seputra selaku Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, dinilai terbukti korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat tahun 2024, yang merugikan negara Rp29,5 miliar.

Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Langkat yakni Bosna Trimanta Peranganingin, David Simamora dan Esra Meliany Sinaga, meyakini perbuatan para terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer.

Yakni Pasal 603 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saiful Abdi dan Supriyadi oleh karenanya

Polres Belawan Ringkus Pengedar 15 Paket Sabu

BELAWAN (Waspada): Personel Satuan Reserse Polres Pelabuhan Belawan meringkus seorang pengedar 15 paket sabu-sabu di Jl. Veteran Pasar VII Desa Manunggol Kecamatan Labuhan Deli.

Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di sebuah rumah di kawasan Jl. Veteran Pasar VII. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penggerebekan di lokasi.

Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan A. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah tas berwarna coklat yang berada di dalam lemari kamar pelaku.

Dari lokasi, petugas mengamankan 15 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 17,20 gram, satu bungkus plastik klip kosong, satu buah dompet kecil warna merah muda, satu buah tas warna

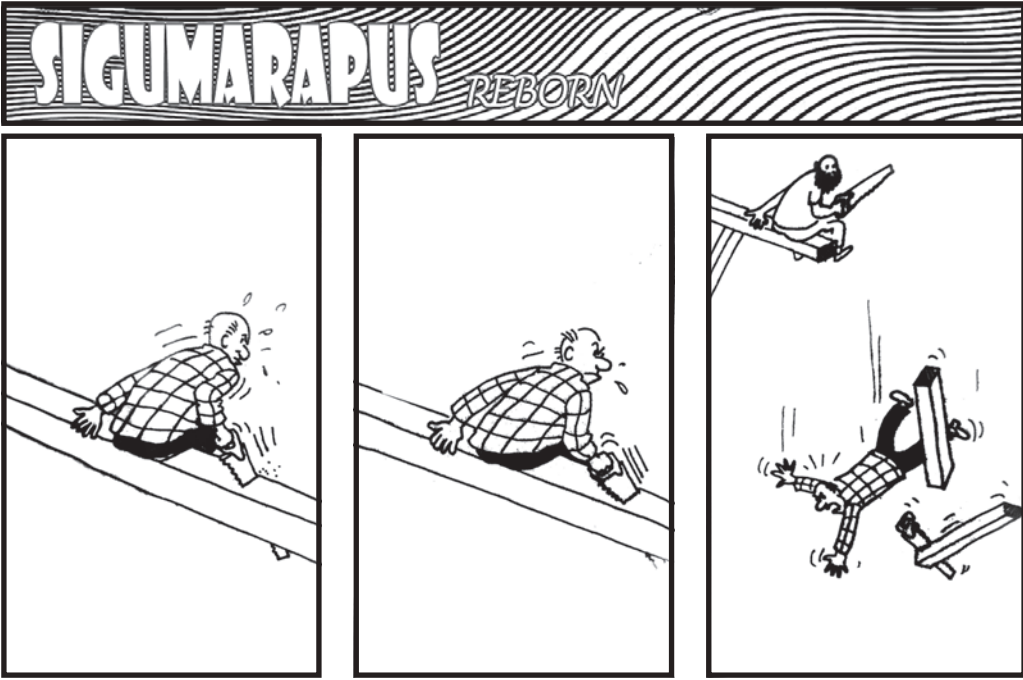
coklat serta uang tunai sebesar Rp600.000.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P Sembiring melalui Kasat Narkoba AKP A.R. Riza, Minggu (6/9) membenarkan adanya pengungkapan tersebut.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian kami tindak lanjuti dengan penyelidikan. Hasilnya, personel berhasil mengamankan satu orang yang diduga sebagai pengedar dan menyita 15 paket sabu dengan berat bruto 17,20 gram," ujar AKP A.R. Riza.

Kasat Narkoba menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap sumber barang serta jaringan peredaran narkotika yang berkaitan dengan pelaku. Saat ini pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

(m25)



Jadwal Shalat																															
K o t a	Zuhur	'Ashar	Magrib	'Isya	Imsak	Shubuh	Syuruq	K o t a	Zhuhur	'Ashar	Magrib	'Isya	Imsak	Shubuh	Syuruq	K o t a	Zhuhur	'Ashar	Magrib	'Isya	Imsak	Shubuh	Syuruq	Zhuhur	Ashar	Magrib	'Isya	Imsak	Shubuh	Syuruq	
Medan	12:26	15:33	18:32	19:41	04:53	05:03	06:18	L.Seumawe	12:32	15:37	19:39	18:48	05:58	05:08	06:23	Sibolga	12:26	15:35	18:31	19:39	04:54	05:04	06:18	Panyabungan	12:22	15:33	18:27	19:35	04:51	05:01	06:16
B. Aceh	12:39	15:44	18:46	19:55	05:05	05:15	06:30	L. Pakam	12:25	16:33	18:31	19:40	04:52	05:02	06:17	Sidikalang	12:27	15:35	18:32	19:41	04:55	05:05	06:19	Teluk Dalam	12:29	15:41	18:34	19:42	04:58	05:08	06:23
Binjai	12:27	15:34	18:33	19:42	04:54	05:04	06:19	Sei Rampah	12:24	15:32	18:30	19:39	04:51	05:01	06:16	Sigli	12:37	15:41	18:44	19:53	05:03	05:13	06:28	Salak	12:27	15:36	18:33	19:41	04:55	05:05	06:20
Bireuen	12:34	15:39	18:41	19:50	05:00	05:10	06:25	Meulaboh	12:36	15:43	18:42	19:51	05:03	04:13	06:28	Singkil	12:30	15:39	18:35	19:44	04:57	05:07	06:22	Limapuluh	12:23	15:31	18:29	19:47	04:50	05:00	06:15
B. Pidie	12:33	15:39	18:40	19:49	05:00	05:10	06:25	P.Sidimpuan	12:24	15:34	18:28	19:37	04:52	04:02	06:17	Stabat	12:27	15:34	18:33	19:41	04:54	05:04	06:18	Parapat	12:25	15:34	18:30	19:39	04:53	05:03	06:17
G. Sitali	12:30	15:41	18:35	19:44	04:59	05:09	06:23	P. Siantar	12:25	15:33	18:30	19:39	04:52	05:02	06:17	Takengon	12:33	15:39	18:40	19:49	05:00	05:10	06:25	Gunung Tua	12:22	15:32	18:27	19:36	04:50	05:00	06:15
K. Jahe	12:27	15:35	18:32	19:41	04:54	05:04	06:19	Balige	12:25	15:34	18:30	19:38	04:52	05:02	06:17	T.Balai	12:22	15:30	18:27	19:36	04:49	04:59	06:14	Sibuhuan	12:22	15:33	18:26	19:35	04:50	05:00	06:15
Kisar	12:22	15:31	18:28	19:37	04:50	05:00	06:15	R. Prapat	12:21	15:31	18:26	19:35	04:49	04:59	06:14	Tapaktuan	12:32	15:40	18:38	19:46	05:09	05:09	06:24	Lhoksukon	12:32	15:37	18:38	19:47	04:58	05:08	06:23
Kutacane	12:29	15:37	18:35	19:44	04:56	05:06	06:21	Sabang	12:39	15:43	18:46	19:55	05:05	05:15	06:30	Tarutung	12:24	15:34	18:30	19:39	04:53	05:03	06:18	Dolok Sanggul	12:26	15:35	18:31	19:40	04:54	05:04	06:18
Langsa	12:29	15:35	18:35	19:44	04:55	05:05	06:20	Pandan	12:26	15:35	18:31	19:39	04:54	05:04	06:18	T.Tinggi	12:22	15:32	18:30	19:39	04:51	05:01	06:16	Kotapinang	12:20	15:30	18:26	19:34	04:48	04:58	06:13
Dihisab oleh: Tim Ahli Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Sumut																Aek Kanopan 12:22 15:31 18:27 19:36 04:50 05:00 06:14															

Permainkan Harga TBS, Pemerintah Diminta Tindak PKS Nakal

KOTAPINANG (Waspada): Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta menindak tegas perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kab. Labusel, yang diduga membeli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit petani swadaya di bawah harga yang telah ditetapkan.

Desakan itu diungkapkan praktisi hukum di Kab. Labusel, Guntur Erixon, SH kepada wartawan, Jumat (4/9). Menurutnnya, selama ini petani swadaya di Kab. Labusel sangat dirugikan akibat harga pembelian TBS yang rendah di tingkat PKS dan agen.

“Ini sangat merugikan. Selisih harga pembelian yang dilakukan PKS jauh lebih rendah dari ketetapan pemerintah, berkisar Rp400/Kg. Bayangkan jika satu PKS dalam sehari membeli 600 ton TBS dari petani, berapa kerugian yang ditimbulkan. Ini tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Selama ini, kata Erixon, rendahnya randemen (persen-tase perbandingan jumlah mi-nyak mentah atau CPO yang diha-silkan dari setiap kilogram TBS) selalu menjadi alasan PKS mene-kan harga TBS petani. Padahal, parameter tersebut tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada petani.

“Randemen itu yang tahu hanya PKS. Petani tidak pernah tahu. Inikan terlalu sepihak. Inilah alasannya sehingga harga tran-saksi yang diterima petani lebih rendah dari referensi yang ditetap-kan pemerintah,” katanya.

Selain harga yang tidak sesuai, Erixon juga mengkritik praktik pemotongan timbangan yang selama ini dirasakan petani. Me-nurutnya, tidak ada alasan bagi PKS memotong 2 persen hingga 4 persen, bahkan 6 persen, dari TBS yang dijual petani.

Karenanya, Erixon meminta pemerintah, baik Kementerian Pertanian, Pemprov Sumut, Pem-kab Labusel, dan pihak kepolisian melakukan supervisi terhadap penerapan harga TBS kelapa sawit seluruh PKS di Kab. Labusel. Dia juga mendesak agar diberikan tin-dakan tegas, sehingga ada efek jera.

“Ini sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian, Andi Arman Sulaiman terkait perlindungan harga TBS petani dalam rapat koordinasi pembahasan perkem-bangan dan upaya stabilitas harga TBS di Auditorium Gedung F Ke-menterian Pertanian, Jakarta, pada Juni lalu,” katanya.

Pengacara muda ini mengaku siap bekerjasama jika pihak kepo-lisian dalam hal ini Polres Labu-hanbatu Selatan maupun Pem-kab Labusel mengambil langkah tegas terkait berbagai praktik ke-curangan tersebut. Dia juga siap memberi masukan jika Pemkab berniat membentuk regulasi dan tim perumus serta pengawasan harga TBS kelap sawit.

Diberitakan sebelumnya, harga TBS kelapa sawit petani swadaya yang diterapkan sejumlah PKS di Kab. Labusel, diduga tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah, sehingga merugikan petani.

Berdasarkan informasi di-himpun wartawan, Kamis (3/9), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut telah menetapkan harga TBS pekebun mitra swada-ya untuk periode 2 hingga 8 Sep-tember 2026, berkisar Rp3.624,20 hingga Rp3.762,93 per Kg. Se-mantara itu, harga TBS pada sejumlah PKS jauh dari ketetapan tersebut, yakni berkisar Rp2.860 hingga Rp3.030 per Kg. (*a09/B*)

Keluar Garis Lintasan Setelah Dihantam Angin Kencang KMP Sumut II Kandas Di Danau Toba

SIMALUNGUN (WASPADA): Kapal Motor Penumpang (KMP) Sumut II mengalami kendala saat berlayar di perairan Danau Toba, kawasan Tigras, Kabupaten Simalungun, Jumat (4/9).

Kapal tersebut diduga kandas atau tersangkut pada batu di da-sar perairan, sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya.

Seorang warga di sekitar Pela-buhan Tigras mengatakan, KMP Sumut II hendak berangkat dari Pelabuhan Tiga Ras menuju Pela-buhan Simanindo, Samosir pukul 19:00. Saat itu, kondisi cuaca di kawasan Danau Toba disebut kurang bersahabat.



SPEEDBOAT disiapkan untuk menganatisipasi hal-hal tidak diinginkan saat terhentinya KMP Sumut II di dekat Pelabuhan Tigras, Jumat (4/9) malam.

“Kapal berangkat sekira pukul 19:00. Karena cuaca buruk, tidak lama setelah meninggalkan pelabuhan, kapal diduga kandas di batu sehingga tidak bisa berge-rak,” ujarnya.

Sementara itu, PT Pemba-ngunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Belawan menyampaikan kronologis terhentinya Kapal Motor Penye-berangan (KMP) Sumut II saat berlayar dari Pelabuhan Tigras menuju Pelabuhan Simanindo, Jumat (4/9) malam.

Peristiwa itu terjadi ketika KMP Sumut II sedang melakukan manuver untuk bertolak dari Pe-labuhan Tigras menuju Si-manindo. Namun, kondisi cuaca yang tiba-tiba berubah disertai angin kencang menyebabkan kapal terbawa hingga keluar dari garis lintasan dan kandas pada bagian haluan kiri.

Setelah menerima informasi dari kru kapal, tim PT PPSU be-rsama KSOP Utama Belawan yang sedang bertugas di lapangan, se-gera melakukan penanganan se-suai standar operasional pro-sedur (SOP).

Sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya situasi darurat, petugas telah menyiapkan tiga unit speedboat untuk membantu proses eva-kuasi apabila diperlukan.

saat kejadian, KMP Sumut II membawa delapan kendaraan roda empat dengan total 22 pe-numpang sesuai data manifes. Seluruh penumpang dilaporkan dalam kondisi selamat.

PT PPSU melalui Kepala Ba-gian Unit Transportasi KMP Sumut Rama Tresia mengatakan, sekitar satu jam setelah kejadian, KMP Sumut II berhasil ditarik kembali menuju Pelabuhan Ti-gras oleh KMP Sumut I.

“Kurang lebih satu jam kemu-dian, KMP Sumut II berhasil di-tarik ke Pelabuhan Tigras oleh KMP Sumut I dengan pengawalan tiga speedboat untuk menganti-sipai hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Rama Tresia, Sabtu (5/9).

Sementara itu, Pelaksana Tu-gas (Plt) Kepala KSOPP Danau Toba yang juga Koordinator

KSOP Utama Belawan, Torra Hasugian membenarkan adanya peristiwa tersebut. Hal itu terjadi akibat cuaca yang kurang bersa-habat.

Menurut Torra, KMP Sumut II terhenti saat melakukan ma-nuver akibat kondisi cuaca buruk yang disertai angin kencang seca-ra tiba-tiba.

“Kapal lari dari garis lintasan akibat angin kencang dan kandas pada bagian haluan kiri kapal,” kata Torra.

Untuk memastikan kesela-matan seluruh penumpang dan kondisi kapal, personel KSOP Uta-ma Belawan langsung melaku-kan pemantauan serta berkoor-dinasi dengan operator kapal dan pihak-pihak terkait.

Torra menambahkan, tiga speedboat telah disiapkan sejak awal sebagai langkah kesiapsia-gaan apabila proses evakuasi pe-numpang diperlukan.

“Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus memastikan kapal layak layar pasca kejadian, KMP Sumut II untuk sementara berhenti ope-



PROSES evakuasi KMP Sumut II di perairan Danau Toba.

rasi sembari menunggu tim dari Belawan melakukan pemerik-saan secara menyeluruh,” ujar-nya

Dia juga mengimbau ma-

syarakat khususnya keluarga para penumpang, agar tidak mudah terpancing informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Masyarakat diminta menunggu

informasi resmi yang disampaikan pihak berwenang terkait kondisi dan penanganan KMP Sumut II.

“Seluruh pihak diminta tetap tenang dan tidak mudah mem-

percaya informasi yang belum terverifikasi. Informasi resmi akan disampaikan pihak yang berwenang,” demikian Torra. (*a06/a32/I*)

Ketua KPU Non Aktif Belum Kembalikan Mobil

STABAT (Waspada): Sudah tujuh bulan Ketua KPU Kab. Langkat non aktif berinisial HM tidak dapat memperlihatkan mobil dinas Toyota Avanza BK 1096 P yang sebelumnya dipin-jamkan Pemkab Langkat.

Dugaan penggelapan itu kini ditangani jajaran KPU Sumut

setelah dilaporkan ke KPU RI. Dikatakan Ketua KPU Sumut Agus Arifin, Sabtu (5/9), bulan lalu yang bersangkutan pernah membuat surat pernyataan akan mengembalikan mobil tersebut. Namun hingga kini belum dilak-ukan.

“Kami tidak dapat berspe-

kulasi ke mana mobil dinas terse-but. Namun kasusnya sudah dilap-orkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tinggal menunggu jadwal sidang,” kata Agus.

Sementara itu, aparat Polres Langkat juga mulai menyelidiki dugaan penggelapan mobil dinas

tersebut. Selain di Komisi Pemilihan Umum, beberapa ASN yang telah lama puma tugas di Pemkab Langkat hingga kini belum juga mengembalikan mobil dinas Toyota Innova tanpa sebab pasti. Dua diantaranya mantan Asisten Pementintahan AK dan SU. (*a11/C*)

Pemkab Simalungun Ajak MUI Jaga Kerukunan

SIMALUNGUN (WASPADA): H. Ikhwauddin Nasution, Lc, MM memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun periode 2026-2031 setelah terpilih pada Musyawarah Daerah (Musda) VIII Dewan Pengurus MUI Simalungun, Sabtu (6/9).

masyarakat.

“MUI mempunyai kedudu-kan strategis. Ulama bukan hanya tempat umat bertanya tentang persoalan keagamaan, tetapi juga menjadi penun-ut, penyejuk, sekaligus penjaga nilai dan moral dalam kehidupan ber-masyarakat,” ujar bupati.

Pemkab Simalungun me-mandang MUI dan para ulama sebagai mitra strategis dalam upaya pembangunan daerah.

Karena itu, MUI diharapkan tidak hanya berperan hadir saat per-soalan muncul, melainkan mam-pu bergerak lebih awal dalam memberi arahan dan penge-gahan sebelum masalah berkem-bang menjadi besar.

Bupati mengajak mendorong MUI memperkuat pembinaan gene-rasi muda, menghadirkan dak-wah yang sejuk, mencerdaskan dan relevan, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digi-tal agar pesan keagamaan dapat tersampaikan lebih luas.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada penguatan eko-nomi umat, peningkatan kepe-dulian sosial, serta pemeliharaan persaudaraan, baik sesama umat islam maupun dengan pemeluk agama lain.

“Kita boleh berbeda dalam banyak hal, tetapi ketika me-

nyangkut kepentingan masyara-kat dan masa depan Simalungun, kita harus mampu berdi ber-sama. Kita harus terus menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, serta kerukunan antarumat beragama dengan sebaik-baiknya,” tegas Sekda.

Dia menambahkan, Pemkab Simalungun senantiasa mem-buka ruang seluas-luasnya untuk komunikasi, koordinasi dan kola-borasi dengan MUI, para alim ulama, pemuka agama, serta seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara Dr. H. Maratua Simanjuntak me-nyampaikan apresiasi atas pelak-sanaan Musda VIII MUI Kabu-paten Simalungun.

Ustadz Maratua menegaskan, MUI lahir, tumbuh dan berkem-bang berkat dukungan ulama, pesantren, serta organisasi kemasyarakatan Islam. MUI meru-pakan mitra pemerintah yang me-mikul tanggungjawab moral dan keilmuan untuk memberi ma-sukan, nasihat serta bimbingan keagamaan.

“Menjadi pengurus MUI bu-kan sekadar kehormatan, melain-kan sebuah amanah dan tang-gungjawab besar kepada umat serta di hadapan Allah. Setiap pengurus harus memiliki keil-

muan, kompetensi, integritas, keteladanan, komitmen, serta memahami ajaran Islam yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah,” ujar Ustadz Maratua.

Dia juga mengingatkan agar seluruh pengurus senantiasa menjadikan nilai luhur Habona-ron Do Bona sebagai semangot dasar dalam menegakkan kebe-naran, keadilan, persatuan dan kemaslahatan bersama.

“Dari Musda VIII ini diha-rapkan lahir kepemimpinan baru yang amanah, berintegritas dan berkomitmen memperkuat pe-ran MUI sebagai Khadimul Um-mah sekaligus mitra strategis pe-merintah. Sinergi erat antara ulama, umara dan umat diharap-kan semakin kokoh demi mewu-judkan Kabupaten Simalungun yang aman, damai, religius, toleran dan maju di masa depan,” tegas Maratua.

Sementara, 12 formatur dalam Musda VIII itu menetapkan H. Ikhwauddin Nasution, Lc, MM, sebagai Ketua MUI Sima-lungun periode 2026 - 2031, di-dampingi H. Riswan Hasibuan sebagai Sekretaris dan Nursamsi, SP, MM sebagai Bendahara.

Formatur juga menetapkan Drs. H. Ki Darjat Purbu, MM, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Simalungun 2026-2031. (*a06/B*)

Perampok Dengan Modus Petugas Leasing



TERDUGA pelaku berinisial AL alias UL, 47, warga Kota Sibolga, diamankan di Mapolres Tapteng.

PANDAN (WASPADA): Bermodus sebagai petugas pengah utang perusahaan pembiayaan (leasing), sekelompok pria diduga merampas sepe-damotor milik warga di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Seorang terduga pelaku berinisial AL alias UL, 47, warga Kota Sibolga, kini diamankan polisi.

Kasus tersebut diungkap Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Tapteng setelah kor-ban, Ikhsan Batubara, 38, membuat laporan polisi pada Minggu (30/8).

Kasat Reskrim Polres Tapteng Iptu Dian AP mewakili Kapolres Tapteng mengatakan, peristiwa itu terjadi di Jl. Sibolga-Padangsampung, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Selasa (25/8) sekira pukul 10:00.

Menurutnya, saat kejadian sepedamotor Yamaha N-Max milik Ikhsan sedang dipinjam kera-batnya, Syamsuman Purbu, 73, untuk berbelanja.

Dalam perjalanan, tiba-tiba satu mobil Toyota Avanza warna hitam menghadang sepedamotor tersebut. Kemudian, beberapa orang turun dari mobil dan mengaku sebagai petugas leasing FIF.

“Para pelaku berdalih hendak menarik kenda-raan. Namun, saat diminta menunjukkan surat tugas dan dokumen legalitas resmi, mereka tidak dapat menunjukkannya,” ujar Iptu Dian AP, Sabtu (5/9).

Bukannya menunjukkan dokumen resmi, para pelaku diduga langsung membawa sepedamotor tersebut. Bahkan, Syamsuman dipaksa masuk ke dalam mobil.

Merasa terancam, Syamsuman meminta diturunkan di pinggir jalan. Selanjutnya, dia pulang menggunakan angkutan umum untuk mem-beritahukan kejadian tersebut kepada pemilik kendaraan. Akibat peristiwa itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp32 juta.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Tapteng melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan para pelaku.

Hasil penyelidikan mengarah kepada AL. Selan-jutnya, polisi mengamankan pria tersebut di kawasan Jl. R. Suprpto, Kota Sibolga, Senin (31/8) sekira pukul 16:30. “Petugas mengamankan tersangka AL di kawasan Jl. R. Suprpto, Kota Sibolga,” kata Dian.

Dari hasil pemeriksaan, polisi memperoleh informasi bahwa sepedamotor milik korban telah dibawa rekan-rekan tersangka ke luar daerah.

Selanjutnya, petugas melakukan pengem-bangan hingga menemukan sepedamotor tersebut di sebuah gudang di Kota Tebingtinggi, Rabu (2/9).

Sepedamotor yang diduga merupakan barang bukti dalam kasus tersebut selanjutnya disita dan dibawa untuk kepentingan penyidikan.

“Saat ini, AL bersama barang bukti telah diamankan di Mapol-res Tapteng. Polisi masih melaku-kan pengejaran terhadap seju-mlah pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi tersebut,” ujarnya.

“Penyidik juga masih men-dalami peran masing-masing pelaku serta rangkaian aksi pe-rampasan yang dilakukan dengan modus mengaku sebagai petugas leasing,” tutupnya. (*a27/C*)

Dilacak